

**Kumpulan  
Opini Pendidikan**

# Lentera Nanggroe

**Qusthalani, M.Pd**

**PenA Indis**  
Penulis Antologi Indahnya Islam

**2017**



Kumpulan opini Pendidikan



# Lentera Nanggroe

*Qusthalani, M.Pd*

# Lentera Nanggroe

Penulis:  
Qusthalani, M.Pd

ISBN:  
978-602-429-045-0

Ukuran Buku:  
14 x 20 cm

Tebal Buku:  
162 halaman

Editor:  
Nitha Ayesha

Desain Sampul:  
Fandy Said

Tata Letak:  
Fandy Said

Cetak Pertama:  
Maret 2017

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis  
Jalan Bitoa Lama No. 105  
Kel. Antang, Kec. Manggala  
Makassar - Sulawesi Selatan. 90234  
No Hp: 082113883062  
email: pena\_indhis@yahoo.co.id

Dicetak Oleh:



Indis Group  
Jalan Renvile RT 2 / RW 5 Dukuh Legok  
Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan  
Kebumen - Jawa Tengah 54361  
No. Hp: 081226829452

## Sanksi Pelanggaran

### Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

# KATA PENGANTAR

Salah satu kunci kemajuan suatu bangsa adalah generasi muda yang unggul dan berkualitas. Di bidang pendidikan, tidak hanya sisi akademis yang menjadi prioritas pendidik, namun pendidikan karakter juga menempati posisi yang sangat penting.

Tahun 2017 merupakan tahun resolusi untuk literasi pendidikan, maka saya ingin mengambil peran dalam momen tersebut untuk menulis dan mencetak sebuah buku yang merupakan kumpulan opini pendidikan selama tahun 2016 yang saya beri nama *Antologi Opini Pendidikan (Lentera Nanggroe)*.

Kita tahu bahwa dengan membudayakan membaca dan menulis, kita akan menyongsong masa depan dan peradaban yang lebih unggul. Nah, literasi mampu memunculkan kreativitas yang sangat besar. Inilah yang perlu didorong dan dibiasakan. Namun, upaya menumbuhkan budaya literasi ini tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen kuat, sinergi, dan kerja keras yang berkesinambungan untuk mewujudkannya. Upaya

mewujudkannya bisa dimulai dari kita sendiri yang sudah menjadi bagian dari Tim Suksesi Literasi di daerah-daerah.

Kehadiran buku *Antologi Opini Pendidikan* ini bisa dikatakan momentum kebangkitan literasi yang turut mendukung program Kabupaten Literasi yang telah dideklarasikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada medio 2016 kemarin.


Harapan dari penulis, hendaknya langkah ini bisa menjadi percontohan untuk sahabat-sahabat lain khususnya rekan guru di Aceh Utara. Dengan demikian, diharapkan upaya membangun budaya literasi tersebut dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada pelajar maupun pendidik lain di seluruh Indonesia.

**Qusthalani, M.Pd**

Guru SMAN 1 Matangkuli/ Ketua IGI Kab Aceh Utara

# DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	v
2. UJIAN NASIONAL (UN) TIDAK LAGI “SAKRAL”	vii
3. TES CALISTUNG, PANTASKAH?	1
4. SEKOLAH UNGGUL: Prestise atau Prestasi?	17
5. RESOLUSI 2016, ACEH-kan LITERASI	25
6. MEA: MENYONGSONG PENDIDIKAN GLOBALISASI	39
7. DAYAH: PENANGKAL COBOY JAKARTA	47
8. KESENJANGAN PENDIDIKAN DI NEGERI SYARIAH	57
9. UN BAK “KUE BASI”	65
10. PENDIDIKAN ANAK, TANGGUNG JAWAB SIAPA?	75
11. PENDIDIKAN YANG TERTUKAR	87
12. PEMUDA: INSPIRATOR VS EKSPIRATOR	97
13. PEMUDA, PILKADA DAN PENDIDIKAN	105
14. PROFESIONALITAS BAK PUNGGUK MERINDUKAN BULAN	113
15. SNMPTN BAGAI BUAH SIMALAKAMA	117



16. PERLINDUNGAN ATAU “ <i>PENG KE LON DUM NA</i> ”	127
17. UN <i>No</i> , Standar Nasional <i>Yes</i>	137
18. MUTASI: ANTARA PRESTASI DAN AMBISI	145
19. GURU DALAM SEBUAH DILEMA	152



# UJIAN NASIONAL (UN) TIDAK LAGI "SAKRAL"

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Artinya secara implisit pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang paripurna dan dievaluasi dengan adanya ketetapan secara nasional. Hal tersebut juga diperkuat oleh PP No 19 Tahun 2005 dan direvisi kembali dalam permendikbud No.5 tahun 2015. Sehingga Ujian Nasional yang dilaksanakan setiap tahun dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dilaksanakan, walaupun banyak pro dan kontra dalam pelaksanaan UN tersebut.

## **A. Dampak Ujian Nasional**

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, UN yang dilaksanakan setiap tahun menyisakan berbagai persoalan baik terhadap psikologi siswa itu sendiri sampai pelaksanaan banyak terjadi kecurangan. Apakah Ujian nasional (UN) yang dilaksanakan selama ini sudah memenuhi standar yang ada sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)? Sementara kita membaca dan melihat di media massa maupun media elektronik ketika UN dilaksanakan begitu banyak beredar kunci jawaban melalui SMS yang notabene tidak jelas dari mana sumber kunci jawaban tersebut. Apakah pelaksanaan UN yang demikian mampu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang sebenarnya?

Dampak psikologis juga mengancam siswa menjelang Ujian Nasional (UN) sebagian besar dialami siswa SD, SMP, SMA. Siswa-siswiterkadang mengalami rasa cemas karena mereka akan menghadapi bermacam-macam ujian, mulai dari ujian tertulis, ujian praktik, sampai ujian nasional yang paling membuat mereka cemas. Kecemasan tersebut timbul

karena mereka merasa takut dan terlalu memikirkan hasil ujiannya kelak padahal mereka belum berusaha.

Kecemasan dapat memecah belah pemikiran seseorang, membagi dua pikiran seseorang menjadi niat yang baik dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Terkadang seseorang dapat merasa pesimis karena kecemasan. Kegagalan yang paling mereka pikirkan. Akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri karena malu dan phobia terhadap sekolah.

Kenyataan tersebut terjadi sebelum Permendikbud No.144 Tahun 2014 direvisi. Permendikbud tersebut menyebutkan syarat kelulusan sekolah ditentukan oleh nilai UN dan nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) dengan 70% nilai rata-rata rapor dan 30% nilai sekolah. Kelulusan ditentukan melalui bobot 40 persen dari nilai sekolah dan 60 persen dari nilai UN.

## **B. Perubahan Peraturan**

Lain dulu lain lagi sekarang. Dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2015 kriteria kelulusan tidak ditentukan lagi dari nilai UN tetapi 100% dari nilai UAS. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Kepala BPDMPK dan PMP Kemendikbud,

## *Ujian Nasional (UN) Tidak Lagi “Sakral”*

Syawal Gultom dalam rembuknas di Depok Jawa Barat bahwa nilai Ujian Nasional (UN) bukan penentu kelulusan, tetapi kelulusan dikembalikan lagi ke sekolah. Tiga kompetensi yang harus dinilai dalam kelulusan siswa yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menurutnya, misal siswa lulus Ujian Kompetensi Pengetahuan (UKP) yang dulu disebut UN, tapi dia belum tentu bisa lulus sekolah kalau dia tidak lulus Ujian Kompetensi Sikap (UKS) dan Ujian Kompetensi Keterampilan (UKK).

Pemerintah mengharapkan sekolah yang notabeneanya tahu tentang karakteristik siswanya, merekalah yang berhak menentukan kelulusan siswa. Bukannya disamakan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Para kritikus UN sekarang boleh lega, karena persoalan utama UN yang selama ini mereka kritik sekarang sudah diakomodasi oleh pemerintah. Fungsi UN sebagai syarat kelulusan yang menjadi sumber segala masalah, seperti inflasi nilai oleh sekolah dan berbagai macam dampak negatif UN, seperti pembelajaran mekanis dengan pemikiran tingkat rendah, sistem drill, kecurangan massal, fenomena kebocoran soal,

pengawasan ketat polisi, stres, bahkan sampai ada yang bunuh diri, diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Menghapus fungsi UN sebagai syarat kelulusan sudah tepat. Mengembalikan penentu kelulusan siswa pada sekolah sudah sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebab seluruh proses pembelajaran terjadi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, guru dan sekolahlah yang lebih mengerti dan memahami proses perkembangan pembelajaran siswa. Siswa, guru, dan orangtua, semestinya juga lega, karena proses belajar mengajar di sekolah sudah bisa kembali ke jalur yang benar secara pedagogis, yaitu proses pembelajaran berkualitas, menarik, membangkitkan semangat belajar, dan motivasi tinggi tanpa ancaman dan paksaan.

### **C. Dampak Peraturan Baru**

Perubahan kebijakan pengembalian kelulusan ke sekolah dapat memberikan dampak positif dan negatif baik bagi sekolah dan siswa itu sendiri. Dampak positif yang didapatkan antara lain meminimalisir kecurangan-kecurangan yang kerap terjadi, membagikan kunci jawaban, mencontek dan sebagainya yang selalu menghantui kita

## *Ujian Nasional (UN) Tidak Lagi "Sakral"*

dikala UN. Begitu juga dengan adanya kebijakan tersebut ritual-ritual pragmatis yang dapat mengganggu psikologis siswa sebelum Ujian Nasional tidak perlu dilakukan lagi. Siswa tidak terbebani lagi dengan kelulusan sekolahnya. Mereka dapat belajar dengan santai dan nyaman. UN bukan lagi momok yang menakutkan bagi mereka.

Bagi pendidik sendiri kebijakan tersebut dapat membuat lega dan merasa tidak terbebani atas kelulusan siswa. Peran guru disini sudah dikembalikan lagi untuk menilai kelulusan siswa tersebut. Ketika hal tersebut terjadi akan menyisakan persoalan, apakah guru dapat berlaku adil dalam meluluskan siswa-siswinya? Apakah sekolah masih mengejar indeks kelulusan siswanya tanpa mepedulikan kualitas pendidikan siswa tersebut?. Di sini integritas seorang guru di uji, begitu juga sekolah sejauhmana sekolah tersebut berperan sebagai lembaga pendidikan yang seyogyanya meningkatkan kualitas pendidikan.

### **D. Solusi**

Bagi pemerintah kebijakan Menteri Pendidikan Anies tetap menyisakan persoalan terkait fungsi ujian standar seperti UN yang multiparameter. Tes standar seringkali

mengelabui publik dengan angka-angka dan tabel yang tidak relevan dan tak mampu memotret apa yang diketahui dan dikuasai siswa. Meminjam istilah Harris dkk (2011), "tirani niat baik", seringkali lebih mendominasi ketimbang pemikiran rasional argumentatif tentang makna ujian dalam proses pendidikan. Agar kebijakan ini semakin bermakna, ada beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan oleh Mendikbud pasca dihapuskannya fungsi UN sebagai syarat kelulusan.

**Pertama**, keberadaan UN multiparameter tetap harus dikaji ulang. Ujian nasional sebagai pemetaan kualitas sekolah secara teori psikometrik tidak memiliki dasar yang kuat. Ujian nasional sebagai pemetaan hanya berfungsi sebagai pemetaan kompetensi individual siswa dan tidak dapat ditransfer untuk menilai kualitas sekolah. Menilai kualitas sekolah dan kualitas guru melalui sebuah tes standar yang mengukur kompetensi siswa, jelas sebuah kesalahan logika. Kualitas sebuah sekolah tidak dapat dinilai dari agregat nilai UN siswa. Pemerintah perlu memberikan pedoman bagi guru dan sekolah dalam rangka pengembangan penilaian pendidikan sebagai bagian dari

## *Ujian Nasional (UN) Tidak Lagi "Sakral"*

proses belajar itu sendiri. Pengayaan dengan berbagai macam metode evaluasi dan penilaian sangat diperlukan.

**Kedua**, keputusan kelulusan yang dibebankan kepada pihak sekolah, tentu membawa dampak tersendiri, yakni pengawasan harus dilakukan maksimal. Baik itu pengawasan secara internal maupun eksternal. Karena bisa jadi, subjektif pihak sekolah yang akan bermain di kebijakan ini. Mekanisme pengawasan perlu diperketat, supaya kebijakan kelulusan yang dibuat sekolah tidak seenaknya saja dan benar-benar berdasarkan hasil yang objektif. Daerah harus membuat standar kelulusan siswa, sebagai pegangan bagi sekolah dalam meluluskan siswanya

**Ketiga**, kualitas pendidikan tidak dapat ditentukan melalui skema evaluasi ala UN. Kualitas pendidikan ditentukan dari keutuhan kebijakan pendidikan yang terintegrasi satu sama dan kebijakan pengembangan profesional guru. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab mengembangkan kapasitas guru dan meningkatkan kualitas sekolah sebagai *locus educationis* utama peningkatan kualitas pendidikan.



**Keempat**, siswa harus mempersiapkan diri dengan belajar bukannya melakukan ritual-ritual yang dapat mengganggu psikologisnya. Walaupun nilai UN bukan penentu kelulusan tetapi hasil nilai kelulusan menjadi penentu siswa melanjutkan ke sekolah berikutnya. Jika siswa tak mendapatkan nilai yang tinggi, nantinya akan menyulitkan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi yang terbaik.

**Kelima**, siswa yang tamat dari satu sekolah tetap menerima ijazah dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DNUN). Dulu, DNUN ini sama dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni). Jika melamar di satu perusahaan, maka yang diminta tetap ijazah dan DNUN. Jika nilai DNUN rendah, belum tentu diterima, sehingga sangat penting untuk siswa dalam meningkatkan nilai UN-nya.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan kebijakan kelulusan kepada pihak sekolah secara umum memberikan keuntungan bagi daerah, khususnya siswa dan sekolah itu sendiri. Hal itu dikarenakan selama ini standar nasional yang dikemas dalam Ujian Nasional (UN) tidak berpihak kepada daerah atau sekolah-sekolah di wilayah

## *Ujian Nasional (UN) Tidak Lagi "Sakral"*

terpencil. Namun demikian sekolah harus melakukan penilaian secara objektif, tidak melakukan kecurangan-kecurangan dan memiliki standar penilaian yang baku dalam meluluskan siswa. Tidak hanya mengejar kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan itu sendiri.

Semoga dengan peraturan baru tersebut dapat menghilangkan paradigma lama terhadap pelaksanaan UN yang selalu terjadi kecurangan-kecurangan yang sistematis. Guru dapat merasa lega, karena mereka sekarang punya peranan dalam kelulusan siswa, namun kejujuran guru di sini juga menjadi suatu tantangan. Siswa juga dapat belajar dengan nyaman dan psikologisnya akan lebih stabil. Mudah-mudahan kualitas pendidikan Indonesia khususnya Aceh dapat terus meningkat dan dapat bersaing dengan dunia luar kedepannya. Mudah-mudahan!

**Banda Aceh, 12 April 2013**

## TES CALISTUNG, PANTASKAH?

Aneh ketika ada yang kontra terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang digadang-gadang pemerintah saat ini. Penulis bukan kontra terhadap program tersebut, tetapi ada beberapa pelaksanaannya yang sudah diluar batas kewajaran. Kita harus memahami apa itu pendidikan usia dini dan bagaimana perkembangan kognisi seorang anak?

Anak-anak, seiring berkembangnya otak berkembang pula cara berpikirnya. Anak-anak saat berumur 2-7 tahun baru belajar berpikir menggunakan simbol-simbol, dan pencitraan batiniah, namun pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak logis. Pikiran di titik ini sangat berbeda dengan pikiran orang dewasa. Mereka belum mampu untuk memahami lebih jauh daripada itu, ketika hal tersebut dipaksakan maka akan terjadi konflik dalam otak si anak. Itulah yang terjadi pada pendidikan usia dini sekarang.

### **A. Indikator permasalahan**

Penulis memiliki beberapa indikator atas permasalahan tersebut.

## *Tes Calistung, Pantaskah?*

*Pertama*, dalam kurikulum pendidikan usia dini disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak pada usia dini sedang membutuhkan proses belajar untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangannya. Dengan demikian berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan berdasarkan pada perkembangan dan kebutuhan masing-masing anak, tetapi yang dilaksanakan sekarang secara tidak langsung mereka mulai diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Disitu permasalahan mulai muncul. Terkesan aneh memang dan kita tidak pernah sadar akan permasalahan tersebut.

*Kedua*, selama ini kita bangga ketika anak-anak kita sudah pintar membaca, menulis dan berhitung sebelum umur tujuh tahun. Kita beranggapan mereka pintar, tanpa kita sadari ketika mereka menginjak umur 9 tahun mereka akan bosan untuk belajar. Memang permasalahan ini belum ada kajian dan penelitian yang mendalam, tetapi kenyataan yang terjadi seperti itu.

*Ketiga*, dalam Islam juga telah disebutkan batas umur seorang anak untuk belajar sesuai hadis Rasulullah

*shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu yang artinya: “Ajarkan salat pada anak-anak disaat berumur tujuh tahun.” (HR. At-Tirmidzi).Memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa sekitar 50% kapabilitaas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun,8 0% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun, dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif.

## **B. Beberapa Masukan**

Hasil di lapangan jelas-jelas bertolak belakang dengan teori yang ada. Anak-anak yang belajar keras sebelum umur tujuh tahun akan cenderung bosan ketika mereka sudah memasuki Sekolah Dasar (SD), sehingga prestasinya akan menurun.Beberapa sekolah di Aceh terlalu memaksakan terhadap pendidikan anak sebelum umur tujuh tahun. Seperti mewajibkan anak sudah bisa membaca dan menulis sebagai syarat untuk diterima pada Sekolah Dasar. Hal tersebut sudah sangat bertentangan dengan perkembangan berpikir anak yang belum sampai ke tahap tersebut.

## *Tes Calistung, Pantaskah?*

Akibatnya ketika anak sudah mulai sekolah mereka akan malas karena merasa bosan. Kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang untuk kemajuan pendidikan Aceh kedepannya.

Seharusnya kita bisa mencontoh pendidikan di Finlandia yang merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia untuk saat ini. Apa yang berbeda di pendidikan di Finlandia yang notabeneanya bukan negara Islam. Di Finlandia menurut hukum di negara mereka, anak-anak baru boleh mulai bersekolah ketika berumur tujuh tahun. Peraturan tersebut sebagai pertimbangan mendalam terhadap kesiapan mental anak-anak untuk belajar. Mereka juga meyakini keutamaan bermain dalam belajar, berimajinasi, dan menemukan jawaban sendiri. Anak-anak di usia dini justru didorong untuk lebih banyak bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

Semua guru di Finlandia diwajibkan memegang gelar master yang disubsidi penuh oleh pemerintah dan memiliki tesis yang sudah dipublikasi. Satu guru untuk 12 siswa di Finlandia, rasio yang jauh lebih tinggi daripada negara-

negara lain. Jadi guru bisa memberikan perhatian khusus untuk tiap anak, tidak cuma berdiri di depan kelas.

Kredibilitas dan mutu tenaga pengajar yang tinggi memungkinkan pemerintah menyerahkan tanggung jawab membentuk kurikulum dan evaluasi pembelajaran langsung kepada mereka. Hanya terdapat garis pedoman nasional longgar yang harus diikuti.

Upaya pemerintah meningkatkan mutu sekolah dan guru secara seragam di Finlandia pada akhirnya berujung pada harapan bahwa semua siswa di Finlandia dapat menjadi pintar. Tanpa terkecuali. Maka dari itu, mereka tidak mempercayai sistem ranking atau kompetisi yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan 'sejumlah siswa pintar' dan 'sejumlah siswa bodoh'.

Kita memang tidak perlu meniru, karena pada dasarnya Finlandia yang meniru kita. Menurut Menteri Pendidikan, Bapak Anis Baswedan, "Pendidikan di Finlandia berdasarkan ajaran Ki Hajar Dewantara dalam buku "Sekolah Taman Siswa" di Indonesia buku ini bahkan tidak dibaca. Ironis bukan?

**Banda Aceh, 01 Juni 2014**





# SEKOLAH UNGGUL: Prestise atau Prestasi?

Kehadiran sekolah unggulan di Indonesia merupakan harapan yang sejak lama diimpikan oleh banyak kalangan, sebab sekolah unnggulan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendasari kehidupan guna mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

Lembaga pendidikan sebagai sekolah unggulan harus diakui oleh pemerintah dan masyarakat, bukan oleh lembaga atau sekolah itu sendiri. Dinamakan sekolah unggulan dan Model berarti memiliki nilai yang lebih dibanding dengan sekolah biasa yang dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek lain yang sangat menentukan, misalnya proses pembelajarannya atau output yang dihasilkan. Sekolah model juga harus mampu menunjukkan dirinya sebagai sekolah yang pantas untuk dijadikan contoh oleh sekolah lainnya.

Kategori sekolah unggulan menjadi sebuah pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena sekolah

## *Sekolah Unggul: Prestise atau Prestasi?*

dengan label unggulan sudah dianggap mampu mencetak anak didik yang berkualitas. Selain itu, sekolah unggulan juga sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam dalam rangka melakukan perbaikan mutu pendidikan Islam di sekolah.

Sekolah unggul yang ada di Indonesia pembentukannya didasari dari lahirnya UU no. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 4 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi,

*Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.* Khusus di sini diartikan sebagai pendidikan yang dapat memperkaya dan memperdalam potensi kecerdasan mereka.

Aceh sendiri memiliki beberapa sekolah unggulan yang telah dipersiapkan oleh masing-masing kabupaten. Ada beberapa kabupaten yang telah membentuk tiga sekolah unggulan di daerahnya. Seyogyanya sekolah unggulan tersebut memiliki keunggulan pada masing-masing bidang. Bukan unggul pada jumlah siswanya, unggul, jumlah gurunya, unggul indah sekolahnya maupun unggul luas perkarangan sekolahnya. Tetapi unggul yang diharapkan

oleh pengagas/pendahulu kita adalah sekolah tersebut unggul dalam prestasi akademiknya.

#### **A. Realita Sekolah Unggulan**

Sekolah unggulan di Aceh, hanya sebagian kecil yang layak dikatakan unggul dan mencerminkan ciri-ciri sekolah unggul. Beberapa realita yang dilihat sekolah tersebut memasang papan nama dengan nama sekolah unggul, namun prestasi yang dicapai sekolah tersebut bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Berbicara dari profesionalitas pendidiknya juga patut dipertanyakan. Guru yang berada di sekolah unggul masih menggunakan metode pembelajaran klasik, dimana sekolah reguler saja sudah di *haramkan* menggunakan metode tersebut.

Para pemimpin kita selama ini berasumsi bahwa sekolah unggul adalah sekolah dengan jumlah peserta didik paling banyak dan jumlah rombel paling banyak. Sungguh pemikiran yang salah kaprah. Sangat disayangkan ketika kita melihat berbagai even perlombaan yang dilaksanakan masih banyak didominasi oleh sekolah reguler. Sebut saja Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, rata-rata sekolah reguler yang mendominasi juaranya. Belum lagi

## ***Sekolah Unggul: Prestise atau Prestasi?***

perlombaan O2SN, FS2LN dan beberapa even perlombaan lainya. Sungguh sangat disayangkan, sekolah yang digelontorkan biaya yang begitu besar tetapi tidak mampu memberikan hasil yang lebih.

### **B. Masukan Terhadap Sekolah Unggul**

Imran Siregar (2000) mengatakan sebuah sekolah dapat dikatakan sebagai sekolah unggulan apabila memiliki beberapa aspek utama, yaitu:

1. Input yang masuk harus sesuai dengan visi dan misi sekolah unggul yaitu bibit unggul.

Peserta didik harus diseleksi dengan objektif dan transparan. tes seleksi peserta didik baru. Tujuannya tidak semata-mata untuk menerima atau menolak peserta didik tersebut tetapi jauh ke depan untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dengan data tingkat kecerdasan peserta didik tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan proses pembinaannya dan bahkan dapat untuk menentukan target atau arah pendidikan di masa depan.

2. Proses dalam pelaksanaan pembelajaran harus memiliki kelebihan dari sekolah-sekolah lain.

Kemampuan guru yang profesional, sekolah unggulan harus memiliki guru yang unggulan juga. Artinya, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, Komunitas belajar profesional, dimana guru bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk peserta didik belajar, menilai seberapa baik peserta didik, melakukannya, mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan prestasi peserta didik, melalui keterlibatan dalam penyelidikan dan pemecahan masalah, Koherensi program -sejauh mana program-program sekolah untuk belajar peserta didik dan guru yang dikoordinasikan terfokus pada tujuan pembelajaran yang jelas dan berkelanjutan selama periode waktu.

Guru yang profesional, dalam pembelajaran harus menempuh empat tahap, yaitu:

- a. Persiapan, dalam arti yang luas adalah segala usaha misalnya membaca, kursus, pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya yang dilakukan oleh

## *Sekolah Unggul: Prestise atau Prestasi?*

guru dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya. Persiapan dalam pengertian yang sempit adalah kegiatan pembuatan program kerja guru yang meliputi penyusunan kegiatan pembelajaran selama satu tahun, program semester, penyusunan silabus dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum.

- b. Pelaksanaan, bahwa guru harus fleksibel, artinya pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi dan situasi peserta didik. Fokus pelaksanaan pembelajaran adalah pengalaman peserta didik, baik pengalaman kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
- c. Penilaian, perlu dilakukan terhadap kedua belah pihak, baik guru maupun peserta didik. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan.
- d. Refleksi. Tindakan yang dilakukan dengan memikirkan aktivitas pembelajarannya dan melaksanakan pembelajarannya berdasarkan

tujuan yang jelas atas dasar pertimbangan moral dan etika

3. Fasilitas Belajar.

Sekolah unggulan harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Metode Pembelajaran.

Sekolah unggulan harus menggunakan metode pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi aktif dan kreatif yang disertai dengan kebebasan dalam mengungkapkan pikirannya.

5. Program Ekstrakurikuler.

Sekolah unggulan harus memiliki seperangkat kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menampung semua kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Keragaman ekstrakurikuler akan membuat peserta didik dapat mengembangkan berbagai kemampuannya di berbagai bidang secara optimal.

6. Sekolah unggulan harus menghasilkan lulusan yang unggulan.

## ***Sekolah Unggul: Prestise atau Prestasi?***

Keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai Ujian Nasional (UN) yang tinggi. Indikasi lulusan yang unggulan ini baru dapat diketahui setelah yang bersangkutan memasuki dunia kerja dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan lulusan yang dihasilkan dirasa unggulan, bila mereka telah mampu mengembangkan potensi intelektual, potensi emosional, dan potensi spiritualnya dimana mereka berada

Sekolah unggul bisa terwujud dengan memperbaiki proses belajar mengajar, mengubah paradigma mendidik, peningkatan sumber daya guru dan proses di kelas yang perlu banyak dibenah. Mudahan-mudahan pengambil kebijakan dan dinas-dinas terkait di setiap kabupaten benar-benar mempersiapkan sekolah yang unggul, tidak hanya di papan nama saja tertulis SMA Unggul. Namun, sekolah tersebut benar-benar menghasilkan peserta didik yang siap terjun kedalam masyarakat melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Semoga.

**Banda Aceh, 12 Juli 2015**



## RESOLUSI 2016, ACEH-kan LITERASI

Meski istilah Literasi sudah dipakai secara umum puluhan tahun yang lalu tapi nampaknya istilah ini masih asing bagi kita. Banyak guru yang bertanya-tanya, “Istilah apa lagi ini?!” Dan meski sebagian dari mereka sudah pernah mendengar istilah ini tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan ‘Literasi’

Literasi atau kemampuan baca-tulis, merupakan kemampuan yang penting dalam proses perkembangan anak sekolah, karenanya kemampuan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kemampuan anak menuju peningkatan prestasi di sekolah. Fenomena tersebut sering membuat orang lupa dan tidak peduli. Kemampuan membaca dan menulis sering dianggap bukan sesuatu yang perlu diperhatikan dan bukanlah suatu prestasi. Pernyataan tersebut menjadi stigma buruk bagi kemajuan pendidikan.

Stimulasi pencapaian kemampuan literasi mulai dari awal sejak usia prasekolah penting dilakukan. Keyakinan

literasi serta penggunaan teknologi multimedia dapat menjadi faktor penentu kemampuan literasi awal seorang anak. Selain itu aktivitas literasi di sekolah juga dapat berfungsi untuk mengembangkan literasi awal anak.

#### **A. Kondisi Kekikininan di Aceh**

Banyak guru dan para birokrat pendidikan di Aceh, termasuk para pejabat di kedinasan yang membidangi pendidikan yang belum paham apa itu literasi. Lihat saja setiap kebijakan yang dibuat selama ini yang dianggap akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh daripada lain. Perhatikan apakah ada disebut-sebut tentang pentingnya literasi? Bahkan tidak ada suatu gerakan yang dapat mengubah dasar pada pembelajaran membaca dan menulis. Seolah keterampilan membaca dan menulis akan datang dengan sendirinya pada siswa.

Padahal jelas sekali bahwa kemampuan membaca siswa kita sangat tertinggal dari siswa di daerah-daerah lain. Aceh merupakan salah satu daerah yang kemampuan membaca sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain. Indonesia sendiri berada pada posisi kelima dari urutan terbawah, atau sedikit lebih tinggi dari Qatar (356), Kuwait

(333), Maroko (326), dan Afrika Utara (304). (Kompasiana, 30 Maret 2015).

Rendahnya kemampuan membaca anak-anak kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Metode pembelajaran yang dijalankan guru. Umumnya siswa kelas rendah di Sekolah Dasar diajarkan membaca dengan cara menghafal. Menghafal menjadi salah satu penghambat tingkat baca anak. Anak-anak kita tidak begitu kesulitan mengenali huruf, tapi kalau diminta memaknai isi bacaan, mereka lemah.

Oleh sebab itu semua guru, termasuk guru Matematika dan Sains dianggap sebagai Guru Literasi (*teachers of literacy*). Pembelajaran literasi adalah pembelajaran yang integral. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran literasi yang bermutu pada semua mata pelajaran

2. Kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor *determinisme genetic*, yakni warisan orangtua. Seseorang yang gemar membaca dibesarkan dari lingkungan yang cinta membaca. Lingkungan

terdekatnya inilah yang akan mempengaruhi seseorang untuk mendekatkan diri pada bacaan, jadi seseorang tidak suka membaca karena memang sejak kecil dibesarkan oleh orangtua yang tidak pernah mendekatkan dirinya pada bacaan. Lain halnya dengan negara maju seperti Jepang, budaya membaca adalah suatu kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakatnya. Ibarat sandang, pangan dan papan, membaca merupakan bagian dari kehidupan mereka setiap harinya.

3. Pengaruh permainan (*game*) yang makin canggih dan variatif serta tayangan televisi yang semakin menarik, telah mengalihkan perhatian anak dari buku. Tempat hiburan yang makin banyak didirikan juga membuat anak-anak lebih banyak meluangkan waktu ke tempat hiburan daripada membaca buku.
4. Masih minimnya sarana untuk memperoleh bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Andaiapun harus membeli, harga buku yang ada di pasaran relatif mahal. Hal ini menyebabkan orang tua tidak

membelikan buku bacaan tambahan selain mengutamakan buku-buku yang diwajibkan oleh sekolah. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, jangankan terpikir untuk membeli buku bacaan, untuk memiliki ongkos pergi ke sekolah pun terkadang menjadi hambatan bagi mereka.

## **B. Gerakan Literasi**

Gerakan literasi di Indonesia sebenarnya telah dicetuskan oleh Satria Dharma. Dalam bukunya *Boom Literasi: Menjawab Tragedi Nol. Buku* ini menjawab keresahan atas rendahnya budaya membaca dan menulis di tanah air. Buku yang ditulis oleh 16 pegiat literasi Indonesia tersebut mengulas literasi dari berbagai aspek.

Satria Dharma menukil kemampuan tentara Jepang memahami *handbook* peralatan perang, membaca peta, mendalami strategi, dan memodifikasi sistem telegraf nirkabel adalah gambaran literasi fungsional. (Sementara itu, kita bahkan tidak pernah membaca manual book dari semua peralatan atau gadget yang kita beli dan kita lebih suka bertanya kesana kemari bagaimana menggunakan

peralatan yang kita beli tersebut. Padahal semua cara dan aturan penggunaannya sudah ada tertulis pada manual book tersebut)

Perang kerajaan Spanyol dan Inggris yang berakhir di Pantai Gravelines, Perancis, Agustus 1588, dimenangi oleh armada Inggris. Dalam bukunya, *The Achieving Society* (1961), David McClelland menulis, Inggris menang karena memiliki *need for achievement* (kebutuhan meraih keberhasilan) lebih tinggi daripada armada Spanyol. Salah satu penentu *n-achievement* (n-Ach) adalah corak sastra rakyat. Di sinilah pentingnya pembelajaran sastra bagi bangsa. Membaca sastra akan menimbulkan semangat dan meningkatkan '*need for achievement*' bangsa.

Inti dari tulisan ini sebenarnya adalah "gerakan". Setiap perubahan yang ingin kita lakukan pada tahun 2016 ini dengan melakukan suatu gerakan. Gerakan tersebut menjadi tanggung jawab kita, harus sinergi antara pengambil kebijakan dan pelaku kebijakan.

Islam sendiri telah mengajarkan pada kita untuk melakukan suatu gerakan literasi. Ayat pertama yang diturunkan Allah adalah Surat Al-'Alaq, di dalam ayat itu

Allah memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Sehingga membaca merupakan sesuatu yang urgen dan harus dilakukan oleh semua pihak.

Gerakan literasi atau membaca-menulis dapat dimulai dari sekolah-sekolah. Siswa-siswa diajak untuk menyukai membaca buku dengan menyediakan saran dan prasana yaitu buku dan perpustakaan. Buku yang disediakan bukan hanya buku pelajaran tetapi juga buku-buku lain yang dapat menarik minat membaca siswa.

Guru-guru juga mengajak siswa untuk belajar menulis baik karya ilmiah, sastra, puisi maupun lainnya. Untuk menarik minat menulis siswa dapat dimulai dari guru itu sendiri dengan menulis karya-karya yang dapat dimuat di beberapa media.

Pengambil kebijakan yang membidangi pendidikan sudah sepatutnya mendukung gerakan literasi, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengharuskan guru untuk belajar membaca dan menulis. Seperti karya tulis yang dibuat guru untuk setiap kenaikan pangkat harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara diseminarkan di depan para pakar.

## *Resolusi 2016, Aceh-kan Literasi*

Awal tahun 2016 dapat menjadi awal kebangkitan gerakan literasi di seluruh Aceh. Semoga Aceh menjadi pilot project kota literasi bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia.

**Lhoksukon, 01 Januari 2016**



# MEA: MENYONGSONG PENDIDIKAN GLOBALISASI

31 Desember 2015, tanpa ketukan palu, tanpa bunyi gong, tanpa perayaan khusus MEA resmi berlaku bagi negara-negara di ASEAN. MEA yang merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kesepakatan yang lahir di Bali tahun 2003 lalu, pada saat KTT ASEAN ke-9. Dengan berlakunya MEA, pasar produk kita tidak lagi sebatas 240 juta penduduk Indonesia, tetapi sudah 615 juta penduduk di 10 Negara ASEAN.

Tenaga kerja baik di bidang pendidikan maupun bukan merupakan salah satu kesepakatan dari lima hal penting yang akan diberlakukan secara globalisasi antar sesama negara ASEAN, yaitu (1) Barang, (2) Jasa, (3) Tenaga Kerja Terampil, (4) Modal, dan (5) Investasi.

Penerapan MEA ditandai dengan adanya 1.000 supir taxi di Philipina yang belajar bahasa Indonesia. Negara-negara di ASEAN mulai meningkatkan sumber dayanya.

Mereka lebih memperhatikan pelayanan dan kualitasnya, bukan produk, “*service is number one*”.

Jika diperhatikan intergrasi MEA sebenarnya tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada sektor-sektor lain, tak terkecuali “pendidikan” sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Tantangan MEA dalam dunia pendidikan yaitu dengan menjamurnya lembaga pendidikan asing, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing. Untuk itu era globalisasi se-ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara, yaitu; penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), dan kekayaan sumber daya alam hanya (10%),

#### **A. Tantangan Pendidikan Daerah**

Menurut Sekretaris Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, Meter. Eng, Sc di Jakarta, dalam laporan paling baru Acara Pembangunan PBB thn

2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Bersama angka itu Indonesia tertinggal dari dua negeri tetangga ASEAN yakni Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik yaitu 0,683.

Jika dirunut lebih jauh pendidikan kita jauh tertinggal dari negara-negara di ASEAN. Tahun 2014 Aceh menduduki rangking 31 dibawah Papua berdasarkan kelulusan UN siswa SMA, sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-5 dibawah Thailand (sumber: Litbang Kemdikbud, 2015).

Ditambah lagi dari tujuh provinsi dengan tingkat intergritas UN SMA paling tinggi, Aceh tidak termasuk didalamnya yang notabenenya adalah negeri syariat. Belum lagi kemampuan tenaga kependidikan kita Aceh khususnya. Berdasarkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 yang baru saja dilaksanakan kemarin Aceh berada pada rangking 32 di atas Maluku (sumber: kemdikbud, 2015).

Tantangan bagi kita sebagai guru dan semua stakeholder untuk memperbaiki itu semua, sehingga seharusnya pendidikan menjadi salah satu sektor pencetak

tenaga kerja akan mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi.

## **B. Harapan Pendidikan Daerah**

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas, distribusi serta kesejahteraan guru di Indonesia, karena guru merupakan salah satu tonggak untuk mendukung jalannya pendidikan, dan sangat berperan penting dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas. Sehingga sepantasnya pemerintah dapat membuat peraturan untuk menuju penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan siap menghadapi MEA 2015.

Pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan di atas dalam hal ini peningkatan peran

pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, sebisa mungkin agar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

Perbaikan Pendidikan Indonesia khususnya di Aceh juga dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali budaya membaca. Siswa-siswa diajak untuk menyukai membaca buku dengan menyediakan sarana dan prasana yaitu buku dan perpustakaan. Buku yang disediakan bukan hanya buku pelajaran tetapi juga buku-buku lain yang dapat menarik minat membaca siswa.

Guru-guru juga mengajak siswa untuk belajar menulis baik karya ilmiah, sastra, puisi maupun lainnya. Untuk menarik minat menulis siswa dapat dimulai dari guru itu sendiri dengan menulis karya-karya yang dapat dimuat di beberapa media. Pengambil kebijakan yang membidangi pendidikan sudah sepatutnya mendukung ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengharuskan guru untuk belajar membaca dan menulis. Sehingga diharapkan anak-anak siap menghadapi pendidikan globalisasi di era

## ***MEA: Menyongsong Pendidikan Globalisasi***

MEA ini. Tantangannya sekarang adalah apakah kita akan menyerbu negara-negara ASEAN atau sebaliknya, mengingat pendidikan di Indonesia dan Aceh khususnya berada di urutan paling rendah dari sepuluh negara ASEAN.

**Lhoksukon 05 Februari 2016**

## DAYAH: PENANGKAL COBOY JAKARTA

Dua hari ini kita disungguhkan tontonan luar biasa baik dari media cetak maupun eletronik. Indonesia tercengang ibu kota diteror bom walaupun hanya *low explosive*. Teroris memanfaatkan kelalaian dari intelejen kita, mereka beraksi bak seorang coboy. Namun ada keanehan yang terjadi ketika kita melihat kejadian teror tersebut. Keanehan-keanehan tersebut jelas terlihat, seakan-akan masyarakat tidak takut akan teror tersebut. Mereka asyik menonton para peneror layaknya sedang menonton aksi coboy Jakarta.

Keanehan lain juga terjadi mengapa terjadinya sangat bertepatan dengan tenggat divestasi kesepakatan bagi hasil emas dari kontrak emas Freeport di Papua. Mengapa para pelaku teror hanya membawa pistol, granat asli dan bom rakitan *low explosive*. Mengapa para teroris begitu berani beraksi di jalanan kayak coboy dan tidak mau menembaki para penonton aksi. Nampaknya para pelaku teror tidak ingin membunuh rakyat sipil yang jelas-jelas ada di dekat

mereka. Mengapa pelaku terror terlalu toleran kepada rakyat di sekitarnya yang lalu lalang sangat dekat. Fokus teroris hanya pada polisi di pos penjagaan saja, dan teroris hanya berusaha menyelamatkan rekan mereka yang tertahan di dalam pos itu. Ini nampak nyata di berbagai sudut rekaman video-video yang tersebar luas. Keanekan juga terjadi ketika polisi begitu sigap layaknya sedang latihan dan ditonton langsung oleh warga.

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab langsung tetapi bisa dijawab oleh hati nurani kita masing-masing. Walaupun demikian penulis tidak mau berspekulasi lebih jauh terhadap aksi teror tersebut karena bukan ranahnya penulis yang notabenenya seorang pendidik. Namun penulis akan melihat dan menjelaskan dari sudut pendidikan.

Beberapa hipotesis dapat kita tetapkan untuk menjelaskan mengapa para teroris semakin subur di Indonesia. 1) Teroris terjadi karena adanya kesejangan ekonomi, 2) Hukum yang belum adil, 3) Pemahaman Islam yang kurang tepat, dan 4) Dalang utama yang begitu berpengaruh dan kuat.



Ketika kita sudah paham penyebabnya maka bisa merumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasi menjamurnya teroris di Indonesia, salah satunya melalui pendidikan yang tepat yaitu pendidikan yang terintegrasi revolusi mental dari sejak dini. BNPT dalam situsnya juga menyebutkan bahwa pemuda Indonesia menjadi target teroris.

#### **A. Revolusi Mental Ala Pendidikan Dayah**

Teroris selalu identik dengan Islam, padahal jelas definisi teroris itu sendiri menurut Walter Laqueur (2007) dalam bukunya yaitu orang-orang yang menggunakan kekuatan secara tidak sah, mengganggu ketentraman umum, dan meresahkan masyarakat atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Jadi siapa saja yang berbuat demikian dia itu teroris, baik Islam maupun non Islam.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) juga telah menyebutkan bahwa salah satu ciri-ciri teroris adalah gemar mengkafirkan orang lain. BNPT jelas menyebutkan bahwa celana cingkrang, berjenggot dan memakai gamis yang identik dengan ciri-ciri fisik Islam tidak bisa dijadikan sebagai ciri-ciri dari teroris itu sendiri.

Penulis coba menawarkan pendidikan ala dayah salafi yang sudah diterapkan di Aceh ratusan tahun yang lalu sampai sekarang sebagai pendidikan untuk merevolusi mental, sehingga paham radikalisme di Indonesia bisa diminimalisir. Walaupun teroris selalu identik dengan Islam, maka untuk melawan paham Islam radikal yaitu dengan pendidikan Islam itu sendiri, tetapi lebih *soft* dan benar.

Revolusi mental menyangkut keadaan kejiwaan, roh, spiritual dan nilai-nilai (*vested interest*) yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah ruang lingkup kecil atau bahkan dalam sebuah negara.

Aceh melalui pendidikan di dayah telah menerapkan pendidikan karakter dalam merevolusi mental itu sendiri. Pendidikan di dayah dapat membina akhlak dan moral pemuda-pemuda di Indonesia umumnya dan Aceh

Lembaga ini memiliki nilai-nilai pokok yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, antara lain cara pandang kehidupan secara utuh (*kaffah*) adalah sebagai ibadah, menuntut ilmu itu tidak berkesudahan (*long life education*) tetapi kemudian untuk diamalkan. Ilmu dan ibadah adalah

menjadi identik baginya, yang dengan sendirinya akan muncul kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan sebagai nilai utama.

Dayah senantiasa pula menciptakan suasana keikhlasan bekerja untuk tujuan-tujuan bersama. Model pendidikan tersebut terbukti dayah mampu menghasilkan pertahanan mental spiritual yang kokoh dan mampu memberikan pembinaan moral sehingga mendapat tempat di hati masyarakat dan kaum muda Islam. Dayah diakui amat solid dalam menumbuhkan gairah keagamaan yang mendalam sehingga masyarakat menganggap dayah sebagai *basic training* dalam bidang kehidupan moral keagamaan.

Pendidikan yang dikembangkan di dayah tidak hanya berorientasi pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif, melainkan juga berorientasi pada bagaimana seorang anak didik bisa belajar dari lingkungannya, sehingga mereka bisa mengembangkan sikap kreatif dan daya berpikir imajinatif. Itulah salah satu fungsi dayah yang hingga kini masih menjadi kekuatan, inovasi dan senantiasa memberi solusi terbaik dalam berbagai persoalan pendidikan. Hal ini juga disebabkan oleh karakter dan corak

dayah yang tidak hanya bersifat kultural, namun juga berkaitan erat dengan visi dan misi yang hendak dicapai oleh dayah itu sendiri. Itulah sebabnya, mengapa dayah dengan segala kelebihan dan ciri khasnya, masih merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang tetap *survive* di tengah-tengah perkembangan zaman. Ini terbukti, meskipun demikian besarnya tantangan abad teknologi dan lajunya proses modernisasi di tengah-tengah era informasi dan globalisasi dunia sekarang ini. Dayah pun tak pernah menjadi larut dan luntur identitas kedayahannya.

Dayah terus menekuni pendidikan agama, baik itu tauhid, fiqh, tasawuf dan lain-lainnya, serta menjadikannya sebagai fokus kegiatan guna mencetak generasi yang berakhlak di kemudian hari. Sistem dayah dinilai sangat baik dari sisi pendekatan dan pembentukan kemandirian dan karakter santri, karena santri yang belajar diharuskan menginap dan terbiasa mandiri, jauh dari orang tua. Sesama santri dan para guru pun seperti sebuah keluarga yang memiliki kedekatan hubungan emosional.

Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan, sistem pendidikan pesantren bisa membangun

kepribadian anak sesuai dengan pola pendidikan yang diharapkan Indonesia. Pendidikan yang diharapkan di Indonesia yaitu pendidikan karakter berorientasi dalam merevolusi mental muda-mudi Indonesia.

Pendidikan dayah yang selalu konsisten dalam pembangunan moral bangsa, dapat dijadikan rujukan dalam meminimalisir menjamurnya teroris di Indonesia. Ilmu yang diajarkan di dayah lebih mengedepankan ilmu-ilmu yang meningkatkan keimanan kita, bukan ilmu yang radikal. Ilmu jihad pun yang diajarkan jihad yang sebenarnya, bukan memutarbalikkan syariah Islam demi kepentingan pribadi.

Demikianlah perspektif dayah yang dapat diterapkan agar kebutuhan ummat mengenai kontribusi ilmu agama dalam pendidikan karakter untuk merevolusi mental terpenuhi. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang bergaya bak coboy baik di ibu kota maupun lingkungan sekitar kita.

**Lhoksukon, 10 Februari 2016**



# KESENJANGAN PENDIDIKAN DI NEGERI SYARIAH

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini termaktup dalam UUD 45 Pasal 31 Ayat 1-5, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah sampai saat ini sudah melaksanakan perintah UU tersebut. Pertanyaannya Apakah sudah dilaksanakan secara menyeluruh? Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.

Pendidikan seyogyanya memiliki azas keadilan yang merata bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerataan tersebut baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya pengajarnya yaitu guru. Pemerintah jelas mengatakan bahwa beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

## *Kesenjangan Pendidikan di Negeri Syariah*

1. Meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
2. Menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.
3. Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
4. Pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
5. Pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
6. Pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.



7. Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.
8. Pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. (Kompas, 23 April 2015).

Namun begitu banyak masih kesenjangan yang terjadi terhadap pendidikan anak-anak di perkotaan dan pendidikan anak-anak di desa-desa terpencil

Seorang pemerhati pendidikan Prof. Eko Budihardjo, ironi yang justru terjadi dengan pendidikan di negara yang begitu luas ini adalah pendidikan yang tidak meluas merata ke seluruh penjuru nusantara. Di era pembangunan yang sedang gencar-gencarnya ini, kesenjangan masih dirasakan oleh wilayah-wilayah Indonesia yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Bukan hanya antar daerah, tetapi antar kota pun terdapat kesenjangan pendidikan yang sebenarnya juga terlihat timpang. (sumber: [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com))

#### **A. Pendidikan Daerah Terpencil**

Di era pembangunan yang sedang gencar-gencarnya ini, kesenjangan masih dirasakan oleh wilayah-wilayah

## *Kesenjangan Pendidikan di Negeri Syariah*

Indonesia khususnya Aceh yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Hal ini dapat kita lihat, masih banyak sekolah yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk belajar, seperti di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dan Aceh Timur. Proses pembelajaran dilakukan di teras kelas, beralaskan ubin tanpa tikar, sementara atap kelas bocor di sana-sini sehingga aktifitas belajar mereka jadi terganggu (Liputan 6 siang SCTV, 2015).

Contoh lain lagi terjadi di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, fenomena yang terjadi di sana lebih menyedihkan lagi. Contohnya SMPN 5 Langkahan dengan jumlah siswa sudah mencapai 125 orang siswa dengan rombel hanya tiga. Setiap kelas terdiri dari 40 siswa. Sungguh ironis dan tidak efektif.

Pembangunan jalan raya dan jembatan. Anak-anak daerah terpencil harus menempuh jalan yang berdebu dan berbatu dikala kering dan harus berbalut dengan lumpur dikala hujan. Belum lagi harus menyeberang jembatan tali layaknya tarzan untuk menuju ke sekolah. Kalau banjir melanda mereka harus iklas untuk belajar di rumah.

Belum lagi kita berbicara masalah kesejahteraan guru. Setiap sekolah hanya ada 2-3 guru PNS, selebihnya honorer non data, artinya mereka tidak diakui pemerintah. Gaji mereka dibayar oleh sekolah dan swadaya masyarakat setempat.

Tunjangan bagi guru di sekolah terpencil juga menjadi dilema. Mereka yang berjuang mendidik anak bangsa di pedalaman dengan menempuh jarak 45-60 KM juga menjadi sasaran empuk para pejabat. Setiap pencairan tunjangan harus menyeter iuran rutin atau apalah namanya kepada para pejabat yang hanya ongak-ongak kaki di kursi empuknya. Sungguh luar biasa negeri syariatku.

Beberapa sekolah yang masih dikategorikan sebagai sekolah daerah terpencil di Aceh Utara contohnya: SMPN 3 Langkahan, SMPN 4 Langkahan dan SMPN 5 Langkahan. Itu hanya secuil dari sekian banyak sekolah terpencil di Aceh tanpa perhatian pemerintah.

Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan belum merata. Masih banyak sekolah yang butuh diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pembangunan sekolah. Sarana prasarana yang

## *Kesenjangan Pendidikan di Negeri Syariah*

dibutuhkan untuk belajar, guru-guru yang profesional, agar mereka yang ada di daerah terpencil dapat merasakan pendidikan yang layak. Jika semua kebutuhan pendidikan sudah bisa terpenuhi dengan merata maka dapat melahirkan generasi penerus yang berwawasan luas, cerdas, beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Pidarta, 2007).

Pemerintah memang tak henti-hentinya memberikan kebijakan demi kemajuan pendidikan, namun kebijakan demi kebijakan seakan hanya menjadi oase di tengah padang pasir yang kesejukannya hanya sesaat saja. Dalam praktiknya, pendidikan tetap menjadi masalah yang krusial bagi bangsa ini. Terkhusus pendidikan di daerah 3T. tertinggal, terpencil dan terbelakang. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah lama menyadari akan pentingnya pendidikan untuk pembangunan nasional, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang kemudian dirumuskan dalam GBHN yang antara lain dikemukakan bahwa: *Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan*

*mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama.* Namun, terdapat kesenjangan yang luar biasa besar antara cita-cita ideal bangsa dengan kondisi real bangsa Indonesia saat ini.

Dalam hal pendidikan di kota dan di desa sangatlah berbeda, seakan perhatian pada pendidikan di perkotaan membuat kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan menjadi timpang, masalah kesejahteraan guru, juga terdapat ketimpangan dalam hal bantuan untuk fasilitas pendidikan, dan banyak hal lainnya. Maka tidak heran apabila kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata dimana kualitas pendidikan di kota lebih baik daripada di desa.

Benar memang sekolah terpencil tidak hanya di Aceh, juga ada beberapa sekolah terpencil lainnya di Indonesia biasa disebut dengan daerah terdepan, tertinggal dan terluar. Seperti di Kepulauan Anambas, Flores, Papua dan banyak lagi. Namun, mereka lebih diperhatikan kesejahteraannya daripada di Negeri Syariah ini. Sesuai

dengan intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan. Pemerintah sekarang harus fokus pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah terdepan, mereka yang mau mengabdikan diri di daerah tersebut pemerintah siap mengapresiasi dalam bentuk pengangkatan sebagai CPNS dan pemberian tunjangan yang layak. (Kemendikbud, 2016).

## **B. Pemerataan Pendidikan**

Pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus bahu membahu bersama pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting dan dapat selalu mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik, serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa

ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang mengingatkan bahwa dalam dunia pendidikan tak boleh ada sikap diskriminatif yang disebabkan adanya perbedaan kaya dengan miskin akibat faktor wilayah kota dan desa sehingga seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Perlu diimplementasikan dan dilaksanakan dengan segera, agar hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat segera terwujud, dan dapat mendorong lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan kurikulum maupun metodologi yang tidak banyak mengeluarkan biaya (di dalam Hanakristina, 2010).

**Matangkuli, 21 Maret 2016**





## UN BAK “KUE BASI”

Ekstrem, mungkin kata-kata tersebut yang keluar dari mulut kita ketika saya katakan sekarang Ujian Nasional (UN) apapun namanya apakah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau UN Tulis, semua itu hanyalah bak kue basi, tidak ada arti dan bermakna. UN yang dikemas dengan rupa yang cantik dan manis rupanya hanyalah sebuah kue yang sudah lama disimpan, tidak enak lagi dimakan, rasanya sudah basi.

Filosofi kue basi tersebut sangat cocok dengan kondisi UN sekarang ini, sekarang coba kita lihat beberapa fungsi dan tujuan UN itu sendiri. Pemerintah melalui Kemdikbud telah merubah fungsi dari UN yaitu:

1. UN bukan lagi syarat kelulusan mutlak.
2. UN menjadi alat untuk mengukur kinerja pelaksana pendidikan, yaitu pemerintah.
3. Konten di dalam UN menjadi ruang untuk perbaikan ke depannya.

Pemerintah telah memberikan wewenang kelulusan seorang siswa menjadi wewenang penuh sekolah asal siswa. Namun kebijakan ini menjadi tanda tanya besar bagi kita, ketika wewenang tersebut diberikan kepada sekolah sejauh mana integritas sekolah tersebut. Apakah sekolah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan jujur? Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab sampai sekarang.

Seyogyanya kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan dengan kriteria lulus dari satuan pendidikan yang bersangkutan, namun pertanyaannya sekolah mana yang sudah menentukan kriteria kelulusan sebelum UN? Sekolah mana yang berani tidak meluluskan siswanya? Ketika regulasi belum turun kita ramai-ramai berteriak minta semuanya dikembalikan seperti dulu dimana kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan. Ketika pemerintah sudah meng-aminkannya, kita diam seribu bahasa

Seorang siswa yang mulai belajar dari kelas satu, sampai kelas tiga, mereka mulai mempersiapkan diri untuk ujian akhir mereka, mulai dari bimbingan belajar sore sampai les privat. Namun yang terjadi ketika UN siswa

tersebut mulai melakukan kecurangan. Anehnya lagi bocoran jawaban sudah ada pada masing-masing siswa. Kecurangan yang sistematis.

Penulis merasa tidak berlebihan ketika mengatakan UN bak kue basi, mulai dari kecurangan UN sampai kelulusan yang ditentukan oleh sekolah. Pendidikan di Indonesia seharusnya memiliki suatu indikator tingkat keberhasilan siswa secara nasional, namun hal tersebut sirna ketika akhirnya semua wewenang dilimpahkan kepada sekolah, tidak bermakna, tidak ada rasa, hambar.

Kita mungkin tidak menyadari UN telah turut andil dalam pembodohan siswa tersistematis. Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, sekolah A mengadakan Try out. Hasilnya hanya 5% yang lulus. Ajaibnya, pada saat Ujian Nasional dilaksanakan, sekolah A berhasil meluluskan siswanya 100%. Kalau bukan orang Indonesia pasti tidak akan mampu meng-*upgrade* 95% kemampuan anak dalam waktu satu bulan. Tragisnya lagi, nilai sulapan tersebut malah diklaim oleh sekolah maupun pemerintah daerah sebagai sebuah keberhasilan pendidikan yang gemilang.

Orang tua yang melihat nilai UN anaknya sangat bangga, sebaliknya anaknya juga tersenyum girang karena untuk meraih nilai 8 ternyata sangat gampang dan tidak perlu susah payah belajar. Akibatnya, anak semakin malas belajar dan orang tuanya pun tidak pernah menyuruh belajar karena mengira anaknya sudah pandai. Apa yang dilakukan guru tersebut adalah contoh kecil pembodohan siswa tersistematis, legal dan formal. Legal karena nilai yang tertera di raport telah ditandatangani guru/wali kelas dan orang tua siswa.

#### **A. Permasalahan**

Sekolah tidak lagi berdaya memberikan harapan-harapan dan juga tidak berdaya menghasilkan manusia yang tangguh menghadapi tantangan baik moral maupun intelektual. Angka pengangguran pun terus melambung tinggi. Lantas siapa yang disalahkan? Sekolah? Siswa? Orangtua? Ataupun-pemerintah? Penyuapan dari orang tua ke guru, guru yang asal mengajar, hingga pergantian penguasa yang tidak banyak membawa perubahan selain sekedar berganti-ganti kurikulum.

David Mc Leland ahli psikososial berujar, dalam sebuah negara yang tengah berkembang secara ekonomi, dibutuhkan dua kriteria pokok. Yaitu munculnya masyarakat yang “*achievement oriented*” dan kewirausahaan. Ketika hal ini dibawa ke sistem pendidikan, maka orientasi *achievement* berubah menjadi “target kelulusan”. Menjadi sebuah “harga-mati”, dimulai dari sang menteri, gubernur, walikota, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, guru (Joko Susilo, 2009).

Penekanan berantai, dari atas menekan yang dibawahnya, sebuah *threats motivation*. Sampai pada kepala sekolah, guru dan tentu saja murid-murid di kelas-kelas akhir. Mereka harus menanggung beban, yang seharusnya bukan menjadi tanggungan mereka. Karena seringkali “target kelulusan” itu bukan di wilayah pendidikan, namun berada pada tataran politik, dimana sang pejabat membutuhkan dukungan untuk status-quonya selama ini.

Acuannya, jelas berupa nilai akhir UN. Segelintir angka yang konon bicara tentang “kecerdasan” dan sekaligus sebagai bukti keberhasilan para pemegang otoritas. Jika

## *UN bak “Kue Basi”*

tidak “*achieved*” maka mutasi ketempat terpencil dan gersang menjadi ancamannya. Padahal tak ada seorangpun yang mau berhadapan dengan resiko tadi. Lalu semua jurus dimainkan. Mulai dari bocoran soal, sampai otak-atik nilai akhir, dan tentu saja selalu dengan bumbu penyedap aliran uang. Mau sistem manual pakai kertas, atau CBT ( *Computer Base Test*) sama saja, akhirnya akan terjadi bak kue basi.

Aceh patut berbangga karena siswa tingkat SMA/SMK/MA mengalami kenaikan nilai UN pada tahun 2015 dari 5,6 persen tahun 2014 menjadi 6,6 persen. Pemerintah tidak membuat perangkingan pada tahun tersebut dan ada presentasi kelulusan karena kelulusan ditentukan oleh sekolah masing-masing (Serambi Indonesia, 2015).

Namun, menjadi tanda tanya ketika siswa-siswa di Aceh banyak yang tidak lolos dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015 dan Aceh tidak termasuk kedalam sepuluh sekolah dengan indeks integritas paling tinggi. Tanya kenapa?

## **B. Solusi Untuk Persiapan UN**

Tiga bulan menjelang Ujian Nasional, siswa selalu membawa buku pelajaran kemanapun pergi, untuk dibaca jika ada waktu senggang. Tak ada stress berlebih. Tak ada istighozah yang meratap-ratap. Tak ada kesibukan mencari bocoran soal. Tak ada orang tua yang mengancam-ancam kalau tak lulus. Tak ada guru atau kepala sekolah yang bicara target kelulusan. Semuanya biasa saja.

Ujian Nasional berlangsung dan nilaipun keluar dengan serempak. Ada yang lulus dan ada yang tidak. Semuanya berjalan dengan biasa-biasa saja, tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Siswa harus dirubah pola pikirnya, gagal ujian nasional bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih punya opsi, yaitu mengulang untuk tahun depan.

Proses pembelajaran tidak mengajarkan kita untuk mendapatkan nilai 10 yang sempurna, namun "*there is a will there is a way*". Tujuannya sederhana saja, yaitu membuat anak peserta didik lancar dalam mengikuti proses pendidikan, sementara hasil akhir hanya konsekuensi logis, dan bukan tujuan semata.

## *UN bak “Kue Basi”*

Angka itu hanya sekedar penguasaan terhadap *hardskills*, dimana setiap orang juga bisa melakukannya. karena yang terlebih penting adalah pada wilayah *softskills*, dimana *will* dan *skills* digabung menjadi kesatuan integratif.

Wilayah pendidikan kita harus keluar dari sistem dagang, sebuah dunia komersial layaknya salesman yang “*achievement oriented*”, dan kembali pada “*process oriented*”. Tak ada pemahaman tentang *softskills* yang sekedar dibaca dan dihapalkan, karena *softskills* hanya mampu dipahami dengan cara dilakukan saja. Hanya *going in to the object it self*, artinya cuma pendekatan proses saja yang mampu menumbuhkannya.

Saat itu dilakukan, tak ada lagi stress pada anak-anak didik saat masuk ke UN. Semua akan mengalir begitu saja. Karena sistem pendidikan kembali pada fitrahnya, yaitu semata-mata belajar tentang arti dan makna sebuah KESUNGGUHAN. Akhir kata kue UN tak lagi basi, bisa dinikmati bersama-sama. Mulai dari pejabat, kepala sekolah, guru, siswa sampai orang tua siswa bisa menikmati kue UN yang tidak hanya cantik luarnya tetapi juga manis rasanya.

**Matangkuli, 10 April 2016**



## PENDIDIKAN ANAK, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Akhir-akhir ini Nusantara menangis seperti teriris-iris dagingnya, gara-gara anak negeri makin hari makin berubah tingkah laku yang mereka mainkan. Mulai dari tawuran yang tidak terkontrol lagi, merokok tanpa ada yang melarang lagi, dan yang paling menyedihkan terjadi pemerkosaan anak di bawah umur yang saban hari selalu menghiasi media kita selama ini. Berita tersebut seakan-akan sudah menjadi topik utama yang sudah sangat membahayakan. Sebut saja kisah Yuyun di awal April 2016, dimana ia telah diperkosa oleh 14 pemuda desanya. Yuyun masih kelas 2 SMP harus menyudahi hidupnya ditangan para penjahat yang notabene juga masih anak-anak berumur 18 tahun (Kompas, 2016).

Kisah yang memilukan juga dialami Neno Saripah yang diperkosa sampai mati, pelakunya tidak lain adalah seorang anak SMP yang baru selesai mengikuti ujian semester (Tribunnews, 2016).

## *Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?*

Belum selesai kasus Yuyun dan Neno tersebut, daerah Aceh juga tidak mau kalah telah terjadi juga pemerkosaan terhadap anak yang masih duduk di bangku SMP oleh empat pemuda yang diketahui masih teman dekat dari si korban (Serambi Indonesia, 2016).

Aceh dikenal dengan negeri syariat, namun kelakuan mereka masih jauh yang namanya bersyariat. Penulis di sini tidak menyalahkan syariatnya, karena itu merupakan fardhu ain bagi setiap umat Muslim di seluruh dunia, bukan hanya di Aceh. Namun yang menjadi tanda tanya bagi kita semua adalah: ada apa dengan semua ini? Apa yang sudah hilang dari diri kita dalam mendidik anak, sehingga semakin hari semakin bertambah kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Apa yang harus kita perbaiki?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Pemerintah bersama DPR RI juga berupaya merivisi UU perlindungan anak.

Kita tidak serta merta menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan anak bukan hanya

tanggung jawab mereka, tetapi pendidikan anak merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Anak merupakan tanggung jawab bersama, orangtua, sekolah maupun masyarakat.

#### **A. Hilangnya Kontrol Sosial**

Disadari atau tidak lingkungan kita sekarang ini sudah hilang kepedulian terhadap anak-anak, mulai dari orang tua, sekolah dan juga dalam masyarakat. Pergaulan remaja tidak lagi terkontrol dengan baik oleh orangtua mereka dan bahkan sebagian orang tua melepaskan dan membebaskan kehidupan anaknya sesuai kehendak si anak. "*Anakmu anakku, anakku anakmu.*" Kalimat kepemilikan akan nilai kontrol perilaku terhadap generasi muda masa lalu kini hanya kalimat usang dan bahkan dirubah menjadi, "*Anakku anakku, anakmu anakmu, aku tak urus.*" menjadi kalimat 'super' dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, sehingga perilaku generasi muda terlepas dari aturan norma yang berlaku di masyarakat Aceh itu sendiri.

Perbuatan dan tingkah laku yang hari ini menjadi 'karakter' generasi bangsa merupakan sebuah kekhawatiran yang perlu dipikirkan bersama. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kondisi demikian? Semua memiliki peran

## *Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?*

dan tanggung jawab dalam melindungi generasi bangsa ini menjadi lebih baik. Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya 'asing' yang kini menjadi 'karakter' generasi bangsa ini.

Keluarga merupakan lini kehidupan dan pendidikan awal yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kondisi sosial yang baik, karena manusia lahir dalam keluarga, dibesarkan di keluarga, dan dari keluarga inilah setiap manusia akan masuk dalam lingkungan sosial di kemudian hari. Kontrol keluarga menjadi wahana untuk membina generasi muda menjadi generasi yang berakhlak mulia.

Sekolah memiliki peran yang sangat penting setelah keluarga juga tidak memiliki kontrol lagi selama ini. Guru-guru tidak berani mengambil sikap terhadap penyelewangan yang dilakukan siswa. Para guru takut dijerat UU perlindungan anak yang sudah disalahartikan. Anak-anak dibiarkan begitu saja apa yang mereka perbuat. Sekolah hanya menjadi tempat transfer ilmu bukan lagi

tempat mendidik anak menjadi lebih bermartabat dan bermoral.

Masyarakat Aceh dikenal dengan norma hukum adatnya. Sejak zaman dulu Aceh sangat peduli terhadap berbagai kehidupan sosial dalam masyarakatnya. Mulai kontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum adat dalam masyarakat, sampai dengan kontrol terhadap pendidikan anak. Namun semua itu telah hilang ruhnya dan sudah sangat jarang kita jumpai kontrol terhadap pendidikan seperti dulu.

Tidak semua elemen masyarakat tahu tentang peran tersebut. Meskipun tahu, kadang masyarakat seolah menutup mata dan telinga atas apa yang terjadi dalam proses pendidikan. Jangankan mendukung, malah tanpa sadar merobohkan pendidikan. Padahal, tanpa disadari peran masyarakat dalam pendidikan itu cukup besar.

Perilaku masyarakat yang seperti itu nyatanya didorong karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari dalam diri pribadi masing-masing ataupun pengaruh lingkungan. Peran masyarakat dalam pendidikan

## *Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?*

yang besar menjadi sedikit terbengkalai dan dikesampingkan.

Masyarakat memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya perihal sikap mereka yang apatis terhadap dunia pendidikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan berbeda, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan, kemudahan serta kesulitan masing-masing.

Kecenderungan untuk menyepelekan pendidikan biasanya terjadi pada masyarakat yang memang kurang mendapatkan pengajaran yang layak. Mereka yang tidak merasakan efek baik dari pendidikan bagi kehidupan cenderung untuk lebih menganggap bahwa pendidikan tidak penting. Padahal tanpa mereka sadari, peran masyarakat dalam pendidikan itu cukup besar.

### **B. Peranan Gold Triangle**

Penulis menyadari, begitu banyak sudah yang hilang dari diri kita untuk peduli terhadap pendidikan. Konsep-konsep pendidikan yang ditawarkan oleh para ahli lewat begitu saja tanpa kita gubris. Walaupun demikian, penulis coba mengulang kembali konsep pendidikan yang mengolaborasikan semua elemen untuk saling bermitra

dalam pendidikan si anak. Konsep tersebut populer dengan nama “*gold triangle*”. Kemitraan dalam pendidikan anak tertuang dalam kurikulum baru pendidikan Indonesia yang disebut dengan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Kurikulum tersebut mengatur peranan orang tua terhadap proses pendidikan anak di sekolah. Orang tua juga dijadwalkan untuk melihat sendiri bagaimana anak belajar di sekolah.

Pembentukan karakter anak bangsa sangat dipengaruhi oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan (*Golden Triangle*), baik dalam rumah tangga, di sekolah, di dalam masyarakat, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting sekolah dalam membangun karakter bangsa tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan juga sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai estetika dan etika kepada peserta didik. Siswa dibentuk menjadi pribadi berkarakter bangsa yang berakhlak baik dan bermoral tinggi (Agussyahril, 2015).

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter anak bangsa, antara lain pendidikan

## *Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?*

awal, pola asuh anak dalam keluarga, memberi rasa tanggung jawab, kepemimpinan, kearifan lokal, pembinaan/pembiasaan. Keteladanan yang diperlihatkan keluarga kepada anak senantiasa mengarah kepada kebajikan dan perkembangan budi pekerti yang luhur sehingga terpatri pada diri anak. Kebajikan yang demikian tumbuh dan berkembang pada anak menjadi karakter yang kuat dan mandiri.

Salah satu peran penting masyarakat dalam membangun karakter bangsa adalah sebagai kontrol sosial. Masyarakat harus terlibat aktif mengontrol penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungannya. Beberapa peran penting masyarakat dalam pembentukan karakter bangsa adalah pengendalian mutu layanan pendidikan, sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, membantu anak belajar di lingkungan masyarakat, terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler, berkonsultasi masalah karakter anak, pembahasan arah kebijakan pendidikan, kontrol sosial terhadap anak di masyarakat.



Kalau bukan kita yang melakukan perubahan siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang kapan lagi? Kita jua yang bisa menjawab semua itu.

**Lhoksukon, 02 Mei 2016**



## PENDIDIKAN YANG TERTUKAR

Pro dan kontra terhadap setiap bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh suatu instansi menjadi suatu keunikan tersendiri dalam setiap daerah. Namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan bagi keberlangsungan hidup anak bangsa. Pendidikan yang tertukar mungkin menjadi warna tersendiri dalam menyoroti berbagai persoalan pendidikan di negara ini. Pendidikan yang seyogyanya sesuai dengan khasanah dan budaya dalam suatu daerah, namun dipaksakan oleh perubahan zaman untuk mengikuti trend pendidikan daerah lain.

Dampak dan akibat akan timbul akibat dari pergeseran paradigma dan model penyelenggaraan pendidikan yang kita ikuti. Model pendidikan yang sudah jauh dari khasanah suatu daerah dan sangat sulit untuk diterima oleh sebagian masyarakat di daerah tersebut.

Penulis akan merunut satu per satu akibat dari pergeseran model pendidikan yang notabene harus dimulai

## *Pendidikan yang Tertukar*

dari pendidikan dalam keluarga kita masing-masing. Beberapa pekan lalu publik Aceh dihebohkan oleh berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja, hal ini bukanlah yang pertama didapati di Aceh. Jauh hari sebelumnya juga pernah didapati bahwa ada remaja yang sudah terlibat dan masuk dalam dunia prostitusi atau *freesex*.

Harus diakui, adanya problema ini apalagi melihat budaya masyarakat Aceh yang Islami, telah menciptakan suatu kegaduhan atau keresahan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Betapa tidak, masyarakat Aceh dulu tidak pernah mengenal perilaku remajanya yang menyimpang seperti yang marak terjadi dewasa ini. Dalam logika sosial, setiap perbuatan manusia yang sudah menimbulkan keresahan orang banyak disebut sebagai masalah sosial.

Kepolisian Republik Indonesia (2014) merilis dari 11 kasus yang menonjol, pencurian dengan kekerasan tercatat mengalami peningkatan sebesar 17 persen dibanding 2015. Sementara itu, kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sebesar 36,66 persen. Sebaliknya, tindak kejahatan pemerkosaan termasuk yang

menurun cukup banyak, yakni 22,53 persen. Ke-11 (jenis) kasus menonjol itu sendiri diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, judi, pemerasan, perkosaan, narkoba, serta kenakalan remaja.

Berbagai tokoh pakar dalam bidang tersebut, baik pakar hukum, psikolog, pakar agama dan lain sebagainya selalu mengupas masalah yang tak pernah habis-habisnya ini. Kenakalan remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia khususnya di Aceh.

Sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media. Di sisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Lantas timbul pertanyaan, apa yang membuat atau mengarahkan para remaja ini masuk ke dalam perilaku menyimpang? Sosiologi menawarkan ragam pendekatan atau perspektif dalam melihat perilaku menyimpang yang telah menjadi masalah sosial ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural merupakan sebuah pendekatan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bagaimana sebuah struktur yang terdiri dari berbagai elemen-elemennya itu berfungsi (Damsar, 2013). Dalam asumsinya, setiap elemen (bagian) memiliki fungsi dan saling berkaitan dengan elemen yang lainnya. Rusaknya atau melemahnya fungsi sebuah elemen akan berpengaruh pada elemen lainnya.

Tak bisa dipungkiri maraknya remaja yang terjerumus dalam perilaku menyimpang adalah dikarenakan melemahnya fungsi keluarga. Diantara banyaknya fungsi keluarga yang diharapkan adalah fungsi pendidikan. Artinya dalam masyarakat dimanapun, keluarga harus mampu untuk memberikan nilai-nilai edukasi bagi anggota keluarganya. Keluarga harus mampu menjadi *agent* dalam

mensosialisasikan setiap nilai-nilai yang ada dan berkembang pada lingkungan masyarakat setempat.

#### **A. Perubahan Pola Pendidikan**

Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan *cyber space*, internet, informasi elektronik dan digital, ditemui dalam kenyataan sering terlepas dari sistem nilai dan budaya. Perkembangan ini sangat cepat terkesan oleh generasi muda yang cenderung cepat dipengaruhi oleh elemen-elemen baru yang merangsang. Suka atau tidak bila tidak disikapi dengan kearifan dan kesadaran pembentengan umat, pasti akan menampilkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis. Pada era globalisasi telah terjadi perubahan-perubahan cepat. Dunia menjadi transparan, terasa sempit, hubungan menjadi sangat mudah dan dekat, jarak, waktu seakan tidak terasa dan seakan pula tanpa batas. Perubahan yang mendunia ini akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya tersebut. Perubahan tersebut meliputi perubahan arus globalisasi.

Salah satu efek dari modernisasi adalah pergeseran nilai. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam

## *Pendidikan yang Tertukar*

masyarakat. Ketika ada unsur baru yang menarik di hati, maka masyarakat pun perlahan tapi pasti akan mengikut nilai tersebut. Jika melihat perihal masyarakat kita, pergeseran nilai budaya memang wajar terjadi. Setidaknya ini terjadi karena efek dari modernisasi dan globalisasi. Terkadang juga nilai budaya yang telah lama dipegang menjadi sedemikian mudah untuk dilepaskan. Itu disebabkan terlalu kerasnya tarikan modernitas. Modernitas seharusnya dimaknai sebagai pertemuan dari berbagai unsur dalam bumi. Ada kebaikan ada keburukan, ada tinggi ada rendah, ada atas ada bawah. Kita perlu selektif dalam mengadopsi unsur budaya yang masuk. Jangan sampai pranata sosial yang telah lama dibangun kemudian runtuh hanya persoalan kemilau modernitas.

Pada masa pemerintahan Sulthan Iskandar Muda misalnya, bukan hanya dalam hal ekonomi dan agama saja yang terurus, melainkan juga pendidikan yang terpandang. Dulu, banyak orang yang datang dari luar Aceh hanya untuk menuntut ilmu di tanah bertuah ini. Malaysia misalnya, kebanyakan dari masyarakat Malaysia memilih Aceh sebagai ladang untuk menggarap ilmu pengetahuan



sebanyak-banyaknya. Terutama ilmu pengetahuan agama Islam.

Aceh tempo dulu selalu menempatkan orang tua pada peran dan tanggung jawab yang amat besar untuk melahirkan generasi yang akhlakul karimah. Namun hari ini tanpa kita sadari pergeseran budaya telah terjadi, peran dan tanggung jawab itu sudah mulai terkikis karena berbagai alasan mulai dari kesibukan sampai dengan masalah ekonomi, dimana setiap orang tua harus berpacu dengan waktu demi memenuhi kebutuhan keluarga. Belum lagi alasan yang tidak rasional yang menganggap pendidikan umum bagian dari sebuah keberhasilan juga dipengaruhi perkembangan budaya-budaya asing yang meracuni budaya, adat istiadat dan kearifan lokal.

Belum lagi kita latah mengikut pola pendidikan ala kebarat-baratan. Kita rela menukar model pendidikan kita biar dianggap mengikuti zaman dan tidak kuno. Tanpa kita sadari masyarakat di daerah Aceh khususnya belum siap menerima semua itu. Contohnya saja dalam keluarga, kita tidak pernah lagi menyuruh anak-anak untuk menutup aurat. Kita lebih senang melihat anak-anak kita memakai

## *Pendidikan yang Tertukar*

pakaian seksi atau pakai baju jas tertentu yang jelas tidak sesuai dengan budaya kita.

Membiarkan anak-anak bergabung dengan geng tertentu dan juga istilah *weekend* yang diajarkan pada anak-anak. Masih banyak budaya barat lain yang kita ambil dalam mendidik anak kita di rumah. Penulis tidak anti perkembangan zaman, namun masyarakat kita memiliki pola tersendiri dalam mendidik anak. Pola tersebut telah berhasil dilakukan oleh pendahulu kita sebelumnya.

Sudah saatnya kita selaku orang tua untuk kembali membuka lembaran sejarah tempo dulu. Bagaimana orang tua kita dahulu mendidik para generasi yang selalu bertumpu pada pengenalan akan akidah. Berbagai konsep pendidikan yang diterapkan tidak terlepas dari pengenalan jati diri sebagai makhluk Allah yang senantiasa menjauhkan larangan Sang Khalik.

Era sekarang landasan pendidikan hanya bertumpu pada pendidikan formal semata. Kalau kita berkaca pada era sebelumnya keseimbangan pendidikan sangat diperhatikan, khususnya dalam penguatan akidah melalui pendidikan keluarga. Kalau dikaji pada 20 tahun yang lalu anak-anak di

perkampungan diberikan konsep pendidikan keluarga menjadi generasi yang kuat akidah dan memiliki moral yang sesuai dengan tuntunan syari'at. Namun apa yang kita rasakan saat ini dengan ketergantungan pada pendidikan formal dan mengikuti era teknologi yang serba canggih namun sangat lemah terhadap keimanan yang tertanam pada generasi saat ini, sehingga berbagai sikap moral yang tak lagi tercemin sebagai makhluk yang bermartabat tidak lagi bagian yang harus dujunjung tinggi. Hal-hal yang dianggap tamu menjadi hal yang biasa yang setiap saat dipertontonkan pada kita semua.

Salah siapa ini? Generasikah yang salah? Atau pengambil kebijakan? Yang jelas sangat disayangkan bila pintu hati kita sebagai orang tua belum terpanggil untuk menjawab tantangan zaman yang semakin lama moralitas generasi Aceh kedepan semakin hancur, dan jiwa akhlakul karimah tidak lagi tertanam dalam jiwa generasi kedepan.

## **B. Solusi Konsep Pendidikan Berkarakter**

Dalam pendidikan anak yang terpenting adalah mengajarkan kepadanya ketauhidan dan akhlakul karimah. Sebagai contoh, mengakui hanya Allah SWT

## *Pendidikan yang Tertukar*

Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan merupakan cerminan perilaku ketauhidan. Di sisi akhlak, sudah dianggap baik dengan menyenangkan hati orang lain walau sesederhana sekalipun yaitu memberikan wajah berseri saat bertemu dengan saudara muslim yang lain.

Aceh merupakan daerah khusus dan yang pertama menerapkan syariah Islam di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh sudah sepatutnya menempatkan tuntunan syariah menjadi sendi utama dalam pendidikan keluarga.

Konsep pertama, termaktub dalam Al-Quran, tepatnya pada Surat Luqman ayat 13, menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT menceritakan bagaimana Luqman menasihati anaknya agar menyembah Allah semata dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Mempersekutukan Allah SWT lazim dinamakan dengan syirik, syirik dosa besar tak terampuni karena merupakan kezaliman yang sangat besar. Perilaku Luqman seperti penafsiran di atas sudah semestinya diadopsi oleh setiap orang tua agar benar-benar mendahulukan pendidikan tauhid kepada anak mereka supaya meng-Esa-kan Allah

dan memegang prinsip tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun saat terjadi proses pendidikan di rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Konsep kedua, dalam surat yang sama pada ayat 14 secara harfiah memerintahkan kepada manusia agar bersyukur kepada Allah SWT dan kedua orang tua. Secara khusus dalam Tafsir Jalalain menjelaskan maksud bersyukur kepada orang tua lebih dari sekedar menghormati dan memuliakan keduanya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW berpesan melalui hadits riwayat Tabrani, bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.

Atas dasar pedoman umat Islam di atas sudah sepantasnya kita mengabdikan dan berbakti kepada kedua orang tua. Secara mutlak manusia harus ingat pengorbanan luar biasa dari orang tua sejak mengandung, melahirkan, mendidik, memenuhi segala kebutuhan hingga memperoleh keberhasilan. Semua itu tidak terlepas sebab akibat dari keberadaan dan doa dari keduanya.

Dari dua konsep pendidikan ala Luqman tersebut, kiranya fokus pendidikan dalam keluarga bagi anak dimulai

## *Pendidikan yang Tertukar*

dari dua hal tersebut. Melalui pembelajaran tempo dulu semasa hidup Luqman; orang yang dikenal bijaksana dengan kata-kata dan perumpamaan yang hidup pada masa Nabi Daud AS dan anaknya yang tertulis dalam Al-Quran. Kita berharap generasi Muslim sekarang dan yang akan datang mampu istikamah dengan ketauhidan kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua dan mengharap ridha dari keduanya agar dekadensi moral yang sedang terjadi akhir-akhir ini berubah menjadi pola santun, berbudi pekerti luhur, menghormati yang tua, dan menyayangi yang lebih muda.

Harapan besar dari tulisan ini adalah dapat memberi sedikit pencerahan atas pertanyaan besar besar selama ini "*Pendidikan yang Tertukar*" yang mengakibatkan degradasi moral. *Wallahu 'Alam Bissawab*

**Lhoksukon, 01 Juni 2016**

## PEMUDA: INSPIRATOR VS EKSPIRATOR

Presiden RI pertama kita Soekarno pernah berorasi dan menciptakan sebuah kalimat penyemangat yang cukup membuat hati para pemuda bergetar, "*Beri aku 1000 orang tua niscaya kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.*"

Kata-kata yang begitu penuh makna dimasa itu. Beliau sangat yakin dan berharap banyak dari pemuda di Indonesia untuk bangkit dalam mengembangkan negara Indonesia. Negara ini suatu saat akan menjadi negara kuat, maju dan mandiri. Apakah itu masih relevan dengan zaman sekarang? Apakah pemuda sekarang bisa dikatakan pemuda yang penuh inspirasi atau malah pemuda yang ekspirasi. Pemuda yang begitu berharap dari lingkungannya, bukannya pemuda yang akan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya.

### **A. Pemuda Kekinian**

*“Aku enggan untuk berjumpa dengan anak muda yang hanya mengandalkan titel, keperkasaan, dan kelincahan berdebat. Aku ragu apakah mereka mampu atau sanggup memperbaiki negara ini.” – Che Guevara.*

Sebuah kalimat yang dapat mencambuk diri kita atas apa yang terjadi pada negara kita selama ini. Pemuda Indonesia, khususnya Aceh yang dulunya mejadi tokoh inspirasi namun sekarang menjadi pemuda loyo, pemuda mabuk, pemuda yang tidak ada asa.

Beberapa pekan lalu publik Aceh dihebohkan oleh berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja, hal ini bukanlah yang pertama didapati di Aceh. Jauh hari sebelumnya juga pernah didapati bahwa ada remaja yang sudah terlibat dan masuk dalam dunia prostitusi atau *freesex*.

Harus diakui, adanya problema ini apalagi melihat budaya masyarakat Aceh yang Islami, telah menciptakan suatu kegaduhan atau keresahan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Betapa tidak, masyarakat Aceh dulu tidak pernah mengenal perilaku remajanya yang menyimpang seperti



yang marak terjadi dewasa ini. Dalam logika sosial, setiap perbuatan manusia yang sudah menimbulkan keresahan orang banyak disebut sebagai masalah sosial.

Kepolisian Republik Indonesia (2014) merilis dari 11 kasus yang menonjol, pencurian dengan kekerasan tercatat mengalami peningkatan sebesar 17 persen dibanding 2015. Sementara itu, kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sebesar 36,66 persen. Sebaliknya, tindak kejahatan pemerkosaan termasuk yang menurun cukup banyak, yakni 22,53 persen. Ke-11 (jenis) kasus menonjol itu sendiri diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian dengan pemberatan (*curat*), penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, judi, pemerasan, perkosaan, narkoba, serta kenakalan remaja.

Berbagai tokoh pakar dalam bidang tersebut, baik pakar hukum, psikolog, pakar agama dan lain sebagainya selalu mengupas masalah yang tak pernah habis-habisnya ini. Kenakalan remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus. Sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari

## *PEMUDA: Inspirator VS Ekspirator*

hari ke hari semakin rumit. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia khususnya di Aceh.

Sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, di sisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Lantas timbul pertanyaan, apa yang membuat atau mengarahkan para remaja ini masuk ke dalam perilaku menyimpang? Sosiologi menawarkan ragam pendekatan atau perspektif dalam melihat perilaku menyimpang yang telah menjadi masalah sosial ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural merupakan sebuah pendekatan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bagaimana sebuah struktur yang terdiri dari berbagai elemen itu berfungsi (Damsar, 2013). Dalam asumsinya, setiap elemen (bagian) memiliki fungsi dan saling berkaitan dengan elemen yang lainnya. Rusak atau

melemahnya fungsi sebuah elemen akan berpengaruh pada elemen lainnya.

Tak bisa dipungkiri maraknya remaja yang terjerumus dalam perilaku menyimpang dikarenakan melemahnya fungsi keluarga. Diantara banyaknya fungsi keluarga yang diharapkan adalah fungsi pendidikan. Artinya dalam masyarakat dimanapun, keluarga harus mampu untuk memberikan nilai-nilai edukasi bagi anggota keluarganya. Keluarga harus mampu menjadi *agent* dalam mensosialisasikan setiap nilai-nilai yang ada dan berkembang pada lingkungan masyarakat setempat

Melalui semangat sumpah pemuda kita harus menyadari dan bangkit untuk negara Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda, karena kesakralan sumpah tersebut dapat mempersatukan dan membangkitkan gelora cinta tanah air kita semua.

## **B. Pemuda Inspiratif Bukan Ekspiratif**

Sumpah Pemuda lahir dari upaya organisasi-organisasi pemuda pergerakan untuk bersatu dalam sebuah wadah yang telah dimulai sejak Kongres Pemuda Pertama 1926 yang diprakarsai Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

## ***PEMUDA: Inspirator VS Ekspirator***

(PPPI). Namun pada tahun ini, belum ada kesepakatan dalam kerangka memandang tujuan dan cita-cita pemuda dalam membangun semangat persatuan rakyat untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Sumpah pemuda yang secara lengkap berisikan;

### ***Pertama:***

*Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.*

### ***Kedoea:***

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.*

### ***Ketiga:***

*Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*

Ingat, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menjadi pemuda yang inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berarti sebuah pemikiran yang muncul sebagai akibat dari adanya ilham. Pemuda yang inspirasi akan menjadikan rujukan bagi generasi selanjutnya.

Sebut saja sang deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Paduka yang Mulia Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

Seorang tokoh yang sudah menjadi inspirasi banyak orang. Mudanya beliau yang belajar ke negeri barat dan bekerja untuk negara Indonesia di awalnya. Teungku Hasan muda yang begitu bersemangat untuk membangun negerinya menjadi sejahtera. Hasan di Tiro sudah menjadi tokoh melegenda sepanjang hidupnya. Banyak pemuda Aceh yang dulunya sudah menjadi pemuda inspirasi bagi negaranya.

Pemuda inspirasi tersebut dikenal karena kerja dan banyak yang sudah diperbuatnya bagi lingkungan dan negaranya. Pemuda yang tidak manja dan berharap banyak dari pemerintah. Pemuda yang selalu bertanya apa yang sudah kuberikan untuk negeri ini, bukan sebaliknya apa yang sudah negara berikan untuk negara ini. Namun, kenyataan sekarang ini kita sudah menjadi pemuda yang ekspirasi yaitu pemuda yang selalu mencontoh perilaku orang lain dan kita jadikan suatu budaya pada diri kita sendiri. Perilaku yang sangat merusak dan menjadi bom atom bagi generasi bangsa ke depan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa ekspiratif adalah mengeluarkan nafas. Namun dalam kehidupan bisa kita artikan adalah mengeluarkan sesuatu dan mengambil contoh dari lingkungan. Secara implisit hal tersebut

## *PEMUDA: Inspirator VS Ekspirator*

sangatlah benar, tetapi secara eksplisit bisa diartikan keliru. Kita harus memberikan contoh yang baik bagi lingkungan, bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang tidak pernah dianggap ada oleh lingkungan.

Belum lagi kita latah mengikut pola pendidikan ala kebarat-baratan. Kita rela menukar model pendidikan kita biar dianggap mengikuti zaman dan tidak kuno. Tanpa kita sadari masyarakat di daerah Aceh khususnya belum siap menerima semua itu. Contohnya saja dalam keluarga, kita tidak pernah lagi menyuruh anak-anak kita untuk menutup aurat. Kita lebih senang melihat anak-anak kita memakai pakaian seksi atau pakai baju jas tertentu yang jelas tidak sesuai dengan budaya kita.

Mebiarkan anak-anak bergabung dengan gang tertentu dan juga istilah *weekend* yang diajarkan pada anak-anak. Masih banyak yang lainnya budaya barat yang kita ambil dalam mendidik anak kita di rumah. Penulis tidak anti perkembangan zaman, namun masyarakat kita memiliki pola tersendiri dalam mendidik anak. Pola tersebut telah berhasil dilakukan oleh pendahulu kita sebelumnya.

Sudah saatnya kita selaku pemuda untuk kembali membuka lembaran sejarah tempo dulu bagaimana pemuda

terdahulu mendidik para generasi yang selalu bertumpu pada pengenalan akan akidah. Berbagai konsep pendidikan yang diterapkan tidak terlepas dari pengenalan jati diri sebagai makhluk Allah yang senantiasa menjauhkan larangan Sang Khalik.

Negara ini sudah banyak diterpa masalah, namun yakinlah badai pasti berlalu, seiring datangnya harapan akan majunya bangsa dan negara ini. Semua komponen harus tetap menjaga UUD 1945 dan Pancasila, jangan ada yang berani menggoyang atau ingin mengubahnya. Anak-anak ibu pertiwi akan menjadi garda terdepan untuk menjaga UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa ini, dan tentunya dengan semangat Sumpah Pemuda yang akan terus berkobar di dada setiap warga negara Indonesia.

*Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan.  
Selamat hari Sumpah Pemuda.*

Harapan besar dari tulisan ini adalah dapat memberi sedikit pencerahan akan semangat Hari Sumpah Pemuda Ke-88.

*Wallahu 'Alam Bissawab*

**Lhoksukon, 08 Oktober 2016**





# PEMUDA, PILKADA DAN PENDIDIKAN

*(Refleksi Hari Sumpah Pemuda*

*28 Oktober 1928 - 29 Oktober 2016)*

Presiden RI pertama kita Soekarno pernah berorasi dan menciptakan sebuah kalimat penyemangat yang cukup membuat hati para pemuda bergetar, "*Beri aku 1000 orang tua niscaya kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.*"

Kata-kata yang begitu penuh makna dimasa itu. Beliau sangat yakin dan berharap banyak dari pemuda di Indonesia untuk bangkit dalam mengembangkan negara Indonesia. Negara ini suatu saat akan menjadi negara kuat, maju dan mandiri. Apakah itu masih relevan dengan zaman sekarang? Apakah pemuda sekarang bisa dikatakan pemuda yang penuh inspirasi atau malah pemuda yang ekspirasi. Pemuda yang begitu berharap dari lingkungannya, bukan pemuda yang akan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya.

## **A. Peran Pemuda dalam Pilkada**

*“Aku enggan untuk berjumpa dengan anak muda yang hanya mengandalkan titel, keperkasaan, dan kelincahan berdebat. Aku ragu apakah mereka mampu atau sanggup memperbaiki negara ini.” – Che Guevara.*

Pemuda merupakan pilar penting kemajuan bangsa. Pemuda adalah garda depan penentu masa depan bangsa. Maju atau mundurnya suatu negara terletak di tangan pemuda. Pemuda hebat akan membawa kemajuan bangsa. Itulah mengapa, dalam hal apa pun mengenai hajat kehidupan manusia, pemuda selalu menjadi prioritas utama sebagai alat menuju pembangunan dalam mencapai kesejahteraan.

Pemuda adalah sosok yang tidak pernah bosan untuk diperbincangkan dalam berbagai tingkatan generasi. Lalu apa kaitannya pemuda dengan politik? Bagaimana seharusnya peran pemuda dalam politik? Mengapa peran pemuda dalam berpolitik sangat penting? Dan sederet pertanyaan lainnya yang tiada habisnya bermunculan di benak. Partisipasi pemuda dalam politik sangatlah perlu

terutama partisipasi pemuda dalam menyampaikan gagasannya di dalam pesta demokrasi.

Aspirasi pemuda yang bersifat konstruktif sangat diperlukan untuk kebaikan bangsa ini, terlebih pemuda adalah pemimpin masa depan. Maka sangatlah baik bila sejak dini pemuda lebih dekat dengan kiprah dunia politik melalui menyalurkan aspirasinya dalam pesta demokrasi.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam politik di bangsa ini. Pemuda adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian karena semangat juangnya yang tinggi dalam membela negara. Pemuda adalah tulang punggung bangsa yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Pemuda memiliki peran sentral dalam mendobrak kebuntuan politik.

Kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi sehat dalam pilkada sangatlah diperlukan. Namun sayangnya, banyak pemuda saat ini yang acuh terhadap politik. Mereka terdogma bahwa politik cenderung berstigma buruk, terlebih banyaknya berita dari media yang menyebutkan banyaknya kasus penyelewengan wewenang oleh oknum-oknum politik.

## *Pemuda: Pilkada dan Pendidikan*

Pemuda juga menjadi pemilih yang produktif di dalam setiap pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Keterlibatan anak bangsa tersebut diperhitungkan karena mereka dapat memilih dan memilah mana yang sesuai dengan negerinya. Pemuda yang terlibat kampanye menebarkan kampanye untuk mendidik dan memberikan pengalaman bagi para pemuda, sama sekali bukan untuk memecah belah kekompakan pemuda. Selayaknya di antara parpol pengusung calon kepala daerah terjadi kerjasama dan kekompakan, terutama untuk menggelar pesta demokrasi yang bersih dari politik uang, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi kalangan pemuda. Jangan sampai peran pemuda dalam Pilkada hanya ikut-ikutan saja. Untuk para politisi senior yang sudah lama bergelut di dunia politik, berikanlah contoh terbaik bagi para pemuda.

### **B. Pilkada dan Pendidikan**

Sumpah pemuda lahir dari upaya organisasi-organisasi pemuda pergerakan untuk bersatu dalam sebuah wadah yang telah dimulai sejak Kongres Pemuda Pertama 1926 yang diprakarsai Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

(PPPI). Namun pada tahun itu, belum ada kesepakatan dalam kerangka memandang tujuan dan cita-cita pemuda dalam membangun semangat persatuan rakyat untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Sumpah pemuda yang secara lengkap berisikan;

***Pertama:***

*Kami poeta dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.*

***Kedoea:***

*Kami poeta dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.*

***Ketiga:***

*Kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*

Ingat, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menjadi pemuda yang inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berarti sebuah pemikiran yang muncul sebagai akibat dari adanya ilham. Pemuda yang inspirasi akan menjadikan rujukan bagi generasi selanjutnya.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam melahirkan pemuda yang handal untuk membangun bangsa.

## *Pemuda: Pilkada dan Pendidikan*

Pemuda yang akan menjadi sosok pemimpin untuk memperbaiki negeri kita yang sudah terkoyak-koyak dan tercabik-cabik oleh berbagai peristiwa dan khusus yang tidak pernah habis. Sosok pendidiklah yang sangat berperan untuk menciptakan sosok pemuda yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini.

Sebut saja sang deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Paduka Yang Mulia Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Seorang tokoh yang sudah menjadi inspirasi banyak orang. Mudanya beliau yang belajar ke negeri barat dan bekerja untuk negara Indonesia di awalnya. Teungku Hasan muda yang begitu bersemangat untuk membangun negerinya menjadi sejahtera. Hasan di Tiro sudah menjadi tokoh melegenda sepanjang hidupnya. Banyak lagi pemuda Aceh dulunya yang sudah menjadi pemuda inspirasi bagi negaranya.

Lalu apa hubungannya pendidikan, pemuda dan pilkada? Penulis mencoba menguraikan kembali peranan pendidikan dalam pilkada serentak 2017 depan. Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota yang peduli terhadap pendidikan nantinya.

Ketokohan dari seorang pemuda Aceh yang sudah penulis sebutkan di atas bisa menjadi rujukan bagi kita bersama. Pemuda yang belajar sampai ke negeri orang untuk membangun negerinya sendiri. Pemuda yang gagah berani dan selalu menebarkan kebaikan bagi kita semua. Sudah tentu, untuk mencapai itu semua harus melalui pendidikan yang sehat. Pendidikan yang dimaksud adalah sang pendidik memberikan suatu gambaran bagi anak didiknya melalui pendekatan tertentu dalam pelajaran tertentu juga.

Pendidik berkewajiban menjelaskan pilkada sehat, menghindari *black campaign*, tanpa *money politik*, dan lainnya. Aneh memang, ketika hal tersebut masih dianggap tabu selama ini. Anak didik juga perlu diberikan pemahaman tentang pesta demokrasi tersebut. Anak didik yang nantinya akan menjadi pemuda yang berkiprah mensukseskan pesta tersebut.

Sudah saatnya kita selaku pemuda untuk kembali membuka lembaran sejarah tempo dulu bagaimana pemuda terdahulu mendidik para generasi yang selalu bertumpu pada pengenalan akan akidah, berbagai konsep pendidikan

## *Pemuda: Pilkada dan Pendidikan*

yang diterapkan tidak terlepas dari pengenalan jati diri sebagai makhluk Allah yang senantiasa menjauhan larangan Sang Khalik.

Negara ini sudah banyak diterpa masalah, namun yakinlah badai pasti berlalu, seiring datangnya harapan akan majunya bangsa dan negara ini. Semua komponen harus tetap menjaga UUD 1945 dan Pancasila. Jangan ada yang berani menggoyang atau ingin mengubahnya. Anak-anak ibu pertiwi akan menjadi garda terdepan untuk menjaga UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa ini, dan tentunya dengan semangat Sumpah Pemuda yang akan terus berkobar di dada setiap warga negara Indonesia.

*Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan.  
Selamat hari Sumpah Pemuda.*

Harapan besar dari tulisan ini adalah dapat memberi sedikit pencerahan akan semangat Hari Sumpah Pemuda Ke-88 dan terpilihnya pemimpin yang peduli terhadap pendidikan di Pilkada serentak 2017.

*Wallahu 'Alam Bissawab*

**Lhoksukon, 28 Oktober 2016**



# PROFESIONALITAS BAK PUNGGUK MERINDUKAN BULAN

Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Profesional melekat pada seseorang menekuni suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional ketika dia sudah ahli dalam suatu profesi. Profesional yang penulis maksudkan di sini adalah profesionalitas seorang guru.

UU No. 14 Tahun 2015 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru sudah dikatakan sebagai pendidik profesional ketika mereka sudah mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK yang ditunjuk. Sertifikat pendidik tersebut

diperoleh dengan berbagai cara, ada yang melalui proses hanya 15 hari pendidikan dan pelatihan dan ada juga dengan cara menghalalkan segala cara yang penting sertifikat pendidik ada ditangan.

Pertanyaannya, apakah dengan hanya belajar 15 hari guru tersebut sudah bisa dikatakan profesional? Ketika guru sudah dijamin kesejahteraannya dengan pemberian tunjangan prestasi ketika sudah mengantongi sertifikat pendidik bisa menjamin mutu pendidikan? Pertanyaan yang harus kita jawab bersama dan harus kita kritisi. Penulis di sini hanya akan membatasi pembahasan pada sejauh mana keberhasilan pendidikan dan pelatihan yang hanya dilakukan beberapa minggu terhadap peningkatan mutu pendidikan dan sejauh mana penggunaan uang tunjangan prestasi terhadap penunjang pendidikan.

#### **A. Diklat Guru Profesional**

Diklat ini diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjukan pemerintah menjadi penanggungjawab untuk mengeluarkan sertifikat pendidik bagi guru yang sudah dianggap profesional. Proses demi proses harus dilalui oleh guru mulai mengikuti UKG, mempersiapkan ADM seabrek sampai

dengan mendekati oknum untuk memperlulus jalannya menuju ke arah profesional. Setelah dinyatakan lulus ADM guru tersebut harus mengikuti diklat selama 15 hari untuk mempelajari berbagai materi yang sudah dipersiapkan. Mulai dari materi pedagogik untuk mempersiapkan guru tersebut terampil dalam mengajar sampai dengan materi profesional terkait dengan basic ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut.

Diklat yang dilakukan dengan hanya lima belas hari diharapkan guru mampu dan menjadi profesional dibidangnya, apakah bisa? Sungguh lucu kalau kita memperhatikan proses demi proses yang dilalui oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut biar dianggap menjadi guru profesional. Ketika kita harus belajar sampai lima tahun untuk memperoleh keserjanaan baik ilmu profesional maupun pedagogik, namun diklat sertifikasi waktu yang dibutuhkan hanya lima belas untuk mengupgrade ilmu terbaru yang saban hari semakin berkembang, mungkinkah?

Model PGDS (Pinter Goblok Diklat Sertifikasi itu sama) dan berapapun nilai UKG (Uji Kompetensi Guru), diklat

## *Profesionalitas Bak Pungguk Merindukan Bulan*

sertifikasi tetap bisa dijalankan, sampai Dapodik menjadi mainan baru dari jajaran birokrat Kemdikbud untuk menentukan nasib guru, siapa yang akan mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat dan siapa yang namanya tiba-tiba lenyap dari daftar PLPG. Semuanya serba misteri.

PLPG yang dilaksanakan tidak perlu memperhitungkan berapa jam dia mengajar, sejauh mana prestasi mereka, dan pintar bodohnya mereka dalam proses pembelajaran. Semua dipukul rata oleh sistem yang masih timbul banyak tanda tanya bagi kita semua. Ketika proses dan sistem yang dilakukan oleh beberapa oknum, apakah guru masih bisa dikatakan profesional. Ini sama juga seperti pungguk merindukan bulan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin, ketika proses yang dilalui masih menjadi hantu penuh misteri.

### **B. Pengaruh TPG terhadap Mutu**

Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau biasa disebut dengan uang sertifikasi merupakan penghargaan pemerintah diberikan kepada guru, dengan harapan guru sudah terjamin kesejahteraannya dan bisa fokus mendidik

anak bangsa. Guru tidak bermain mata dengan yang lain, baik proyek maupun jadi “RBT” setelah pulang mengajar. Guru harus benar-benar menyiapkan segala bahan yang diperlukan untuk mendidik di sekolah.

Uang sertifikasi yang diberikan pemerintah, 20% harus disisihkan untuk peningkatan mutunya. Namun kenyataan yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Guru masih malas-malasan kalau sudah berbicara peningkatan mutu, seperti kata Pak Wapres Jusuf Kalla “Guru sekarang pragmatis, begitu saya berbicara tingkat akademis pendidikan tidak ada respon, tetapi begitu saya berbicara kesejahteraan semua tepuk tangan. (Tempo, 2016)

Penulis akan menjelaskan dalam angka-angka uang sertifikasi yang digunakan guru selama ini. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh direktorat pendidikan kemdikbud RI ditemukan bahwa penggunaan uang sertifikasi untuk peningkatan kompetensi guru hanya 14%, paling banyak digunakan untuk pendidikan anak 38% dan keperluan sehari-hari 25%, selebihnya untuk keperluan lain-lain. Ketika guru masih uring-uringan saat kita berbicara kompetensi, maka yang terjadi adalah setiap hasil

penelitian yang dilakukan tidak adanya hubungan pemberian tunjangan sertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan (*Hasil Survey Kasubdik PMP Kemdikbud, 2015*).

Kita semua tidak terlalu heran ketika melihat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan di penghujung tahun 2015, dimana Aceh khususnya berada pada peringkat 32 dari 33 provinsi yang ada. Daerah yang sudah diberlakukan otonomi khusus, tetapi pendidikan setiap tahunnya makin anjlok, ironis.

Berbicara mutu pendidikan, maka kita berbicara pendidikan dan pelatihan. Baik workhsop, diklat, seminar semuanya memiliki makna bagi guru untuk menambah ilmu yang akan diterapkan di kelas nantinya. Maka mendidik guru sama juga dengan mendidik bangsa, dengan mendidik guru kita akan membantu pendidikan yang ada.

Guru juga sama, ketika ada kesempatan yang diberikan untuk pelatihan. Baik oleh pemerintah melalui dinas terkait, organisasi guru, atau lembaga-lembaga yang berkompeten di bidangnya, hendaknya guru tersebut mengikuti dan mencari pelatihan-pelatihan yang ada. Guru jangan lagi

memikirkan “*Peng tamong*”, sekarang guru harus berani mengeluarkan sejumlah uang untuk pendidikannya sendiri. Jangan sampai kita jadi guru spesialis pelatihan karena ada “*peng tamong*”, bukan karena tujuan untuk mencari ilmu,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir tempo hari juga mengatakan bahwa bagi seorang guru tidak ada kata berhenti belajar. “*Guru wajib terus berguru alias belajar lagi. Jangan karena sudah berstatus guru, atau merasa sudah menjadi guru profesional karena mendapat sertifikat profesi, lalu berhenti belajar. Ini pandangan keliru. Guru memang harus terus berguru.*” Beliau menambahkan, kalau ada guru yang tidak mau belajar maka berhenti saja jadi guru. Guru adalah manusia yang digugu dan dituru jadi wajib belajar.

Prinsip ekonomi mengatakan bahwa ketika barang tersebut sudah berkualitas, maka harganya pun akan mahal. Maka, kalau kita mau digaji dengan nilai yang fantastis maka jadilah kita guru yang berkualitas. Jangan berkoar-koar menuntut gaji tinggi, namun kualitas kita masih di bawah standar.

## *Profesionalitas Bak Pungguk Merindukan Bulan*

Miris rasanya ketika melihat masih banyak yang tidak peduli terhadap pendidikan, tetapi sibuk memikirkan “*peng tamong*” tadi. Tunjangan tambahan telah diberikan, namun pendidikan stagnan jalan di tempat. Guru masih malas belajar dan berharap pelatihan dari pemerintah karena adanya “*peng tamong*”. Paradigma yang harus dirubah dan harus dihilangkan. Virus laten yang berbahaya. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2016 ini guru bisa introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Guru menjadi harapan satu-satunya untuk kemajuan negeri, di pundak gurulah negara Indonesia dan Aceh khususnya bisa keluar dari kemelut permasalahan, dan negeri kita menjadi makmur dan sentosa.

Selamat Hari Guru Nasional (HGN) 2016. “GTK Mulia Karena Karya”.

*Wallahu ‘Alam Bissawab*

**Lhoksukon, 25 November 2016**



## SNMPTN BAGAI BUAH SIMALAKAMA

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pemerintah membuat sebuah regulasi baru terkait SNMPTN: dihapusnya SNMPTN Tulis. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan SNMPTN berbasis prestasi 'akademik' siswa dengan menggunakan parameter prestasi akademik dan nilai UN. Model SNMPTN yang tahun lalu disebut dengan 'jalur undangan' ini melibatkan sekolah secara terintegrasi dengan pangkalan data dan siswa sekolah (PDSS). Kuota yang diberikan untuk SNMPTN bertambah menjadi 40%, dan sisanya dilakukan dengan jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi) sebesar 30% dan jalur mandiri/khusus 30%.

Sementara itu, SNMPTN Tulis akan digantikan dengan model Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) yang digelar 61 Perguruan Tinggi namun tak dibiayai negara. Menariknya, pemerintah menggratiskan SNMPTN ini—sesuai amanah UU Pendidikan Tinggi. Namun, untuk SBMPTN dan

## *SNMPTN Bagai Buah Simalakama*

Ujian Mandiri, biaya ditanggung oleh calon mahasiswa. SNMPTN kali ini menggunakan fasilitas teknologi informasi yang memastikan sistem pendataan terintegrasi. SBMPTN 2016 akan menggunakan dua metode seleksi yaitu ujian tes tulis (*paper based tes*) dan *computer based test* (CBT).

Beberapa kebijakan SNMPTN dan SBMPTN begitu juga bantuan Bidik Misi menarik untuk dikritisi, sehingga penulis mengibaratkan SNMPTN bagai buah simalakama. Istilah yang lazim didengar oleh kita bersama, yang bermakna jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan memiliki resiko yang sama. Fenomena seperti itulah yang sedang dialami oleh para siswa calon peserta SNMPTN 2016. Penulis berani mengatakan demikian karena begitu banyak siswa kita di Aceh Utara khususnya berminat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun semuanya sirna ketika melihat biaya kuliah begitu tinggi. Hampir 75% pekerjaan orang tua siswa itu adalah petani dan nelayan yang penghasilannya hanya 20.000-50.000/hari, jangankan membiaya pendidikan, untuk makan saja susah.

Pemerintah Aceh Utara berharap pendidikan di daerah ini semakin meningkat, tidak hanya *output*-nya saja, namun

juga *outcome*-nya juga. Apa itu *outcome*, yaitu adanya lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang berikutnya dan lulusan sekolah kejuruan (SMK) bisa diterima di lapangan kerja yang ada. Harapan yang sangat jauh dari kenyataan, ketika pemerintah mengharapkan sesuatu yang tidak diikuti dengan pemberian bantuan yang seutuhnya sesungguhnya merupakan harapan yang sia-sia. Beberapa tahun ini pemerintah memang telah menyiapkan program bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi, namun kurang mampu yang dinamakan dengan BIDIK MISI. Dikatakan bantuan karena diberikan sampai selesai pendidikan. Namun yang menjadi miris bagi kita dimana setiap tahunnya kuota penerima bantuan tersebut selalu dikurangi. Tahun 2016 merupakan tahun malapetaka bagi mereka dimana “kuotanya hanya 10% dari kuota peserta SNMPTN 2016 di suatu PTN. Pihak Humas SNMPTN 2016 Unimal mengharapkan Aceh menjadi prioritas penerima kuota terbesar bantuan BIDIK MISI, sehingga anak-anak Aceh Utara khususnya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi tidak ada istilah, “*Buya Krueng Tedeung-deung, buya*

## ***SNMPTN Bagai Buah Simalakama***

*tameung meuraseki.*” Program tersebut tidak terkesan dilaksanakan secara tidak utuh dan tidak sempurna. Nah!

**Lhokseumawe, 12 Desember 2016**

## PERLINDUNGAN ATAU "PENG KE LON DUM NA"

Akhir-akhir ini begitu banyak diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh guru-guru, baik dipidanakan oleh wali siswanya sendiri ataupun kezaliman yang menimpanya dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab. Laporan terhadap guru akibat langkah yang dilakukannya untuk mendidik peserta didik di sekolah merupakan salah satu bentuk menkerdilkan profesi guru itu sendiri. Bentuk diskriminasi yang demikian itu saban hari kita lihat di berbagai media yang ada di Indonesia. Baik di media cetak maupun elektronik. Sebut saja kasus di Makassar pada bulan Agustus 2016, Guru Arsitek SMKN 2 Makassar, Dasrul (52 thn) dianiaya oleh orang tua siswa bernama Adnan Achmad. Semua berawal dari sebuah tugas yang diberikan guru, namun tidak dikerjakan, malah gurunya yang dipukul.

Pada 28 Juni lalu, seorang guru Matematika bernama Muhammad Samhudi yang mengajar di SMP Raden Rahmat

## *Perlindungan atau “Peng Ke Lon Du Na”*

Bolongbendo, dipidanakan oleh orang tua murid, dikarenakan, Samhudi telah mencubit muridnya, Arif (liputan6.com, 2016). Aceh juga tidak mau ketinggalan, seorang guru di Matangkuli, diprodiokan oleh siswanya sendiri karena *human error* ketidaksengajaan terkena martil pada saat melerai anak-anak berkelahi (Tribunnews.com, 2016).

Itu hanya sebagian kecil bentuk diskriminasi terhadap profesi guru di negeri ini. Guru terjebak dalam sebuah sistem dari antah berantah yang tak jelas peruntukannya untuk siapa. Guru menjadi ogah-ogahan untuk mendisiplinkan siswa dan memberi sebuah efek jera untuk memanusikan anak didiknya. Esensi dari satu proses pendidikan adalah pembinaan secara persuasif dengan harapan seorang anak akan mampu mendapatkan nilai-nilai afektif, kognitif dan psikomotorik, di mana seorang anak mempunyai nilai-nilai keilmuan dan pengetahuan, serta moralitas kebenaran saat bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Guru mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu semua dengan harapan anak didiknya menjadi manusia

seutuhnya, namun para guru sudah dikurung dengan sebuah aturan yang keluar. Ibarat monster yang siap menerkam dirinya, di mana dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.39 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang intinya, "*Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.*"

Dalam Pasal 77 huruf (a) UU Perlindungan Anak terkait perbuatan diskriminasi terhadap anak berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.*"

Senjata yang banyak digunakan oleh para wali murid untuk mempertahankan dan menyayangi anak-anaknya, walaupun itu bukan sebuah pendidikan yang baik dari keluarga, mereka sudah salah dalam memahami UU tersebut. Kasus kezaliman yang dilakukan oleh oknum juga

## *Perlindungan atau “Peng Ke Lon Du Na”*

sering kita lihat, dimana guru dimutasikan ke sekolah-sekolah terpencil yang jauh dari tempat tinggalnya sampai sejauh 80 KM, hanya karena bermasalah dengan salah satu kepeknya, mutasi tersebut dengan dalih penyegaran. Guru yang dicabut hak sertifikasinya karena terlalu vokal dalam menyuarakan hak guru lainnya. Guru yang dipindahkan ke struktural karena banyaknya protes yang dilayangkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro pendidikan. Guru tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun itu berlawanan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Penulis mencoba menjelaskan dari sisi lain, yaitu sudah sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada guru terhadap kasus-kasus yang menimpa guru tersebut. Bukan hanya akibat dipidanakan oleh wali siswa itu sendiri, tetapi juga akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan terhadap dirinya. Penulis akan memberikan pemahaman bahwa profesi guru tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.



## **A. Profesi Guru dilindungi Oleh UU**

UU tentang perlindungan anak tumpang tindih dengan UU Guru dan Dosen. Bab III pasal 7 menyebutkan memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada pasal 14 disebutkan kembali guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 39 diperkuat kembali pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atausatuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Pasal 39 PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode

## *Perlindungan atau “Peng Ke Lon Du Na”*

etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jika pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut diluar kewenangan guru, maka guru dapat melaporkannya kepada pemimpin satuan pendidikan. Lahirnya UU Guru dan Dosen seharusnya menjadi legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan. Namun, itu hanya mimpi di negeri syariat ini.

Ironisnya lagi, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Guru. Mereka belum tahu harus mengadu kemana ketika didiskriminasi dan diperlakukan kesewenang-wenangan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal jelas-jelas disebutkan pada PP 74 Tahun 2008, "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain," tegas Pasal 41. Siapapun dia yang telah mendapatkan perlakuan tidak adil, diskriminasi, atau sebagainya dalam hal melaksanakan tugas. Maka guru

berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini yang harus dipahami oleh kita semua sebagai guru. Nah, pertanyaannya kemana kita harus melapor dan siapa yang dapat membela kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dari kalangan para guru.

Dalam UU Guru dan Dosen sudah disebutkan bahwa pemerintah, organisasi profesi guru dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru. Pemerintah sudah bergerak cepat, dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Direktorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Subdit Kesharlington). Sub Bidang ini memiliki tanggung jawab memberikan bantuan hukum bagi guru yang tersandung masalah hukum. Guru bisa melaporkannya kepada Advokat Guru yang ada di bawah kesharlington tersebut.

Organisasi profesi guru juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada guru. Orprof tersebut memiliki kewajiban mendampingi guru-guru yang ada di daerahnya. Namun, perlindungan yang diberikan sudah tentu harus sesuai dengan AD/ART orprof itu sendiri.

## **B. Peng Ke Lon Dum Na**

Pertanyaan yang menggelitik ketika banyak rekan-rekan guru takut ketika berhadapan dengan hukum. Mereka pesimis untuk mendapatkan bantuan hukum. *Peng Ke Lon Dum Na* (Uang Untuk Saya Berapa) itu jawaban yang diberikan oleh beberapa orang ketika ingin memberikan bantuan hukum kepada seseorang. Itu yang muncul dari benak sang guru tersebut.

Ada juga yang takut ketika menindak kedisiplinan terhadap anak didiknya, ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Penjara atau membayar ganti rugi (uang damai), maka pilihan itu yang diambil. “*Peng Ke Lon Dum Na*”, para wali murid, oknum aparat seakan-akan sudah menjadikan itu sebagai lahan bisnis baru. Para oknum tersebut telah mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain.

Organisasi profesi guru yang telah ada selama ini juga sama. Orprof yang mengutip uang bulanan dari para guru, walaupun bukan anggotanya juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika guru tersandung masalah hukum. Seakan-akan uang mereka menguap begitu saja dibawah terik matahari. Bukan perlindungan yang ada, namun peng ke lon dum na.

Bukan tanpa alasan penulis menyebutkan demikian. Sudah rahasia umum, sebuah organisasi profesi di negara ini yang selalu meminta uang dari para guru (ngakunya semua guru anggota mereka, walaupun tanpa bukti) pada setiap even-even atau perayaan sebuah hari bersejarah.

Uang bulanan dan kutipan uang pada setiap kegiatan yang dilaksanakan mereka yang tidak berdampak manfaatnya pada guru itu sendiri, tidak salah ketika guru menyebutkan bukan perlindungan yang mereka dapatkan. Namun, peng ke lon dum na. Organisasi profesi yang belum pantas kita sebut orprof namun hanya sebuah perkumpulan para pendidik atau guru.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud harus segera mensosialisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas, guru merasa aman, nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar undang-undang perlindungan anak. Akibatnya guru menjadi masa

## *Perlindungan atau “Peng Ke Lon Du Na”*

bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**Lhoksukon, 14 Desember 2016**

## **UN No, Standar Nasional Yes**

Ujian Nasional (UN) selalu menjadi salah satu yang seksi dibicarakan oleh setiap menteri baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. UN menjadi taruhan bagi menteri untuk mempertahankan reputasinya dalam kabinet kerja sampai empat tahun kedepan atau hanya sampai beberapa bulan saja. Seakan-akan UN menjadi penentu kinerja menteri tersebut. Padahal begitu banyak pokok permasalahan dalam pendidikan yang harus diselesaikan oleh kementerian. Baik dari sarana prasarana pendidikan yang belum merata ke seluruh negeri, sumber daya guru yang belum sesuai kualifikasi, dan juga kesenjangan kesejahteraan pendidik di daerah-daerah yang bisa dikatakan belum adil.

Berbicara UN, penulis selalu mengajak pembaca untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan, pembelajaran dan untuk apa evaluasi tersebut dilaksanakan. Kita jangan berbicara terlalu jauh dulu, kita harus memahami konsep awal dahulu baru kita bisa

menentukan pilihan penting atau tidak diselenggarakan UN tersebut.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk memanusiakan manusia yang seutuhnya (Sudjana, 2010). Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan sebuah proses yang dinamakan dengan pembelajaran. Trianto (2010) menyebutkan bahwa usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui sudah sejauh mana tujuan pendidikan dan pembelajaran tersebut dicapai diperlukan sebuah alat yang dinamakan dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan sebuah ujian untuk melihat apakah siswa sudah memahami apa yang sudah dipelajarinya selama ini.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas terlihat bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan bukanlah evaluasinya yang harus diutamakan, tetapi proses dalam



pembelajaran itu sendiri. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam pendidikan diantaranya seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya. Baik dari sarpras maupun sumber daya pendidiknya. Lagi-lagi proses bukan semakin sulit ujian yang dibuat maka semakin bagus pendidikan di sebuah sekolah tersebut. Belum ada penelitian yang menjelaskan demikian, tidak ada korelasi dari keduanya.

Hal ini sangat kontras dengan apa yang dijelaskan oleh Wapres kita yang terhormat Bapak Jusuf Kalla. "Tiap tahun ujian nasional harus lebih sulit. Jadi, tahun depan, ujian nasional harus lebih sulit dari tahun ini," tuturnya. Hal ini, menurut Kalla, salah satu cara untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan standar nasional. "*Tujuannya, agar lima tahun ke depan, tingkat kesulitan ujian kita sama dengan soal ujian di Malaysia atau Singapura,*" kata JK kepada Tribunnews, 2016. Jelas-jelas ini merupakan pembuktian terbalik dan keliru menurut saya. Belum ada data Nasional maupun Internasional yang menyatakan demikian.

Coba kita analogikan ini dengan dunia kesehatan yang sama pentingnya dengan dunia pendidikan. Jika kita ingin meningkatkan kesehatan warga maka yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan FASILITAS kesehatan, memberi makanan dan asupan yang bergizi, menjaga sanitasi dan lingkungan yang sehat, menganjurkan cara hidup yang sehat dan olahraga, dll. Tapi kalau pakai logika JK bukan itu yang membuat warga sehat tapi tes kesehatan yang berstandar nasional. Menurut logika ini justru tes kesehatanlah yang akan membuat warga jadi sehat betapa pun parahnya sakit warga. Semakin lengkap dan rumit tes kesehatan yang dilakukan setiap tahun pada warga maka ini akan menjamin warga akan semakin sehat. Jadi kalau warga dites tekanan darahnya, dites kolesterolnya berapa, diuji jantungnya pakai treadmill, diperiksa matanya pakai alat optik, dan semua tes yang canggih maka itu akan membuat warga menjadi sehat. Perkara fasilitas kesehatan yang tidak ada, lingkungan yang buruk, gizi yang rendah, dll itu akan meningkat dengan sendirinya jika tes kesehatan yang berstandar nasional telah diterapkan. Bukankah itu pendapat yang aneh?

Banyak juga para pengambil kebijakan di daerah baik atasan maupun bawahan mengamini pernyataan tersebut, seakan-akan mereka takut kehilangan jabatan, hilang eksistensi diri, karena jabatan banyak dibeli bukan dilihat prestasi yang dimilikinya. Para pejabat tersebut baik kepala sekolah ataupun kepala dinas sudah menganggap kejujuran bukanlah sesuatu yang benar. “Kalaupun kita jujur anak-anak banyak yang tidak lulus maka kita akan dipertanyakan oleh orang tua kita juga dicemooh oleh mereka, lebih baik kita berbuat sesuatu yang penting anak lulus.” Demikian celoteh mereka. Segitu parahnya sudah pendidikan akibat menganggap UN lebih penting dari proses pendidikan itu sendiri.

Fenomena-fenomena yang penulis sebutkan jelas merupakan sebuah pembodohan yang sistematis. Mengeluarkan sebuah pernyataan untuk kepentingan sesaat tanpa peduli masa depan pendidikan itu sendiri. UNAS memang benar-benar sangat besar mudharatnya ketimbang manfaatnya dan menghentikannya adalah tindakan yang sangat penting dan perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita yang stagnan ini.

Dampak psikologis juga mengancam siswa menjelang Ujian Nasional (UN) sebagian besar dialami siswa SD, SMP, SMA. Siswa-siswi terkadang mengalami rasa cemas karena mereka akan menghadapi bermacam-macam ujian, mulai dari ujian tertulis, ujian praktik, sampai ujian nasional yang paling membuat mereka cemas. Kecemasan tersebut timbul, karena mereka merasa takut dan terlalu memikirkan hasil ujiannya kelak padahal mereka belum berusaha.

Kecemasan dapat memecah belah pemikiran seseorang, membagi dua pikiran seseorang menjadi niat yang baik dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Terkadang seseorang dapat merasa pesimis karena kecemasan. Kegagalan yang paling mereka pikirkan. Akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri karena malu dan phobia terhadap sekolah.

Para pakar evaluasi dan pendidikan telah sepakat bahwa UN harus dimoratorium dan mereka bahkan telah menuliskan pendapat mereka beramai-ramai di buku "Buku Hitam Ujian Nasional" yang diterbitkan oleh penerbit Resist Book.

Namun itu hanya isapan jempol belaka, laksana bayi disuguhkan jempol atau kompeng disaat menangis padahal itu jelas penipuan, kosong tak berarti dan dilaksanakan juga itulah KITA. Para tokoh pendidikan sudah phobia dengan kebenaran.

### **Pentingnya Standarasi Nasional**

Penulis dari tahun ke tahun selalu mengingatkan kelirunya pelaksanaan UN yang tak tau muaranya kemana. Begitu banyak peristiwa yang negatif setelah dilaksanakan UN tersebut. Walaupun UN tidak bisa dipertahanan lagi karena merupakan produk selingkuhan yang tidak nyata sehingga sudah menjadi aib di negeri ini, tetapi Sebuah standar pendidikan sangatlah penting untuk memetakan tingkat kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 6). Tertulis dalam PP ini adalah sebuah proses pendidikan bukan hasil akhir.

Lebih lanjut *The International Baccalaureate Organization* (IBO), lembaga yang didirikan tahun 1956 serta berpusat di Switzerland (administrasi) dan di Inggris (riset, kurikulum dan asesmen) telah menerbitkan nama-nama sekolah yang berkualitas internasional. Dalam hal ini hanya standar yang digunakan adalah administrasi, kurikulum, riset baru assesmen. Terlihat juga bukanlah nilai akhir yang menjadikan standar sekolah tersebut menjadi sekolah Internasional.

Pentingnya dibuat standarisasi pendidikan adalah untuk memetakan sejauhmana peningkatan mutu pendidikan di negara ini dan apa saja permasalahan yang ada. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dibuat untuk kepentingan agar kinerja elemen pokok pembentuk pendidikan lebih mantab. Tiga sub system yang akan di standarisasi antara lain: (1) Input, (2) Proses (3) Luaran (BNSP, 2015).

Standar pendidikan kita harus disesuaikan dengan tiga sub system tersebut, baik sarpras yang ada disetiap daerah ataupun lainnya. Pemerintah seharusnya membuat indikator untuk menentukan standar pendidikan yang baku dengan memperhatikan sub sysem tersebut di beberapa

daerah. Mutu pendidikan di daerah tidak bisa disamakan dengan pendidikan di Ibu Kota.

Standar bukan saja untuk melihat nilai akhir tapi juga proses sehingga output yang dihasilkan bukan hanya siswa yang bisa menyelesaikan soal, tetapi juga memiliki life skill dan siap bersaing di era MEA sekarang ini.

Penulis ingin memberikan beberapa solusi terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kedepannya: (1) Tes sebaiknya dilaksanakan berbasis komputer untuk meminimalisir kecurangan, (2) Para pelaku pendidikan menyiapkan anak didiknya jauh-jauh hari dan tidak perlu melaksanakan bimbingan belajar persiapan UN, (3) Merubah paradigma, UN tidak perlu disakralkan, (4) Hasil UN tidak perlu dipublikasi, karena hanya sebagai pemetaan dan menjadi data bagi pemerintah saja. Hal ini untuk menghindari pelaku pendidikan menghalalkan segala cara untuk memperoleh nilai terbaik sekolahnya. (5) Adanya UN Life Skill atau ranah psikomotoriknya juga, bukan saja tes kognitif.

UN dengan sistem sekarang seyogyanya tidak bisa dipertahankan karena namanya sudah tercela dan tidak

diterima lagi oleh masyarakat umum karena proses yang dilakukan selama ini masih keliru. UN bagaimanapun model pelaksanaanya, baik berbasis kertas atau berbasis komputer (CBT) kecurangan semakin bertambah dan tidak bisa menjamin mutu pendidikan akan meningkat di negara ini.

Pemerintah harus mencari formula baru untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan malah memaksakan kehendak nafsu setan untuk melaksanakannya.

**Lhoksukon, 31 Desember 2016**



## MUTASI: ANTARA PRESTASI DAN AMBISI

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam sebuah organisasi (SKPD). Tujuan mutasi secara umum adalah untuk penyegaran agar pegawai yang bersangkutan agar tidak jenuh, sebab secara teoritis kejenuhan dapat menurunkan produktivitas atau kinerja pegawai. Selanjutnya Promosi menurut William B. Werther dan Keith Davis adalah *“A promotion occurs when an employee is moved from one job to another job that is higher in pay, responsibility, organization level.”* artinya promosi merupakan pemindahan karyawan atau pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi (kenaikkan jabatan) sehingga memperoleh kenaikan imbalan (hak/gaji/fasilitas), tanggung jawab, wewenang dan jangkauan kekuasaan yang lebih luas. Sehingga secara filosofis promosi adalah bagian dari mutasi vertikal.

## *Mutasi: Antara Prestasi dan Ambisi*

UU No.43 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebenarnya sudah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem manajemen kepegawaian guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional di Indonesia. Karena kebijakan yang dituangkan dalam UU tersebut mengatur tentang pemberdayaan sekaligus peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yaitu dengan memberikan kesempatan dan peluang yang adil bagi semua aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan struktural maupun fungsional lebih lanjut.

Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikannya di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam manajemen pengelolaan ASN seperti, munculnya sikap-sikap primordialisme dan kedaerahan yang sempit, sehingga mutasi/promosi didasarkan pada asal daerah, suku dan agama yang muncul dalam bentuk like and dislike terutama dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN. Padahal sesuai dengan UU RI 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Daerah BAB VII Paragraf 4 Pasal 76 sangat melarang melakukan hal-hal tersebut.

Walaupun mutasi merupakan suatu proses yang dijamin oleh UU, namun pelaksanaannya sering membuat PNS/ASN diperlakukan tidak adil, mutasi/promosi tidak mengutamakan profesionalisme, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak, integritas dan pesyaratan lain yang diatur dalam UU. Mutasi atau promosi tidak lagi memperhatikan rekomendasi dari Baperjakat atau Tim Penilai Kinerja PNS yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyataan bersedia ditempatkan dimanajuga dalam wilayah Republik Indonesia, menjadi satu dari poin janji suci calon pegawai negeri sipil ketika akan menjadi abdi negara. Dan menjadi kunci sakti bagi penguasa untuk semena-mena menempatkan pegawai negeri sipil. Penempatannya tidak lagi memperhatikan amanah UU tentang jenjang karir dan kepangkatan. Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan, mutasi pegawai cenderung lebih sempit, hanya dalam lingkup kabupaten/ kota saja. Fenomena yang muncul dalam era otonomi ini, seringkali

mutasi pejabat maupun pegawai memunculkan masalah. Tidak jarang mutasi dipermasalahkan karena terindikasi sarat kepentingan, baik balas budi politik maupun dendam politik. Kondisi ini biasanya terjadi ketika baru saja terjadinya pergantian pimpinan daerah. Maka, tidak heran kemudian masa-masa pilkada menjadi masa tidak nyaman dan was-was dalam bekerja. Hiruk pikuk dan intrik politik para calon kepala daerah dan tim suksesnya, besar PNS ditingkat Daerah. Isu dan desas desus kabinet bayangan, pejabat yang akan dilengser dan calon penggantinya menjadi topik yang paling menarik didiskusikan diantara mereka.

Beberapa saat setelah pelantikan, lazim terjadi pergeseran besar-besaran ditataran birokrasi dengan alasan penyegaran. Aksi cuci gudang gerbong mantan pemimpin sebelumnya menjadi pemandangan biasa di media media lokal usai penguasa baru dilantik. Menurut alibi Tim sukses mereka bahwa menjadi bawahan haruslah orang-orang yang loyal terhadap pimpinan dan tidak punya tendensi akan melawan kebijakan. Maka diadakanlah mutasi di jajaran birokrasi sebelum sang pemimpin baru menjalankan

program kerja. Proses inilah kemudian yang membuat karir seorang pegawai negeri sipil bisa meroket tajam, atau bahkan merosot drastis. Beberapa contoh kasus misalnya seorang kepala dinas dengan alasan penyegaran kemudian kehilangan jabatan dan menjadi staf dikantor yang pernah dipimpinnya.

Sebaliknya seorang guru Sekolah Dasar tiba-tiba dipromosi menduduki jabatan strategis dipemerintahan setara kepala bagian Mutasi. Tahap pertama biasanya dilakukan tak lama setelah pelantikan pemimpin baru. Hal ini membuat irama pelayanan publik sangat terganggu. Betapa tidak, pegawai yang belum mendapat giliran mutasi, terombang ambing dengan segala ketidak pastian, cenderung tidak fokus melaksanakan kewajibanya sebagai abdi negara.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Aceh, dimana terjadi pemutasian dalam waktu yang sangat singkat yaitu tiga bula sekali. Tanpa memperhatikan kinerja dan prestasi dari sang Pegawai tersebut sang penguasa langsung memutasi pegawai. Pemerintah Aceh terdahulu saja sudah memutasi sembilan kali pejabat dalam

rentang waktu lima tahun. dimulai dari pelantikan pertama sebanyak 422 pejabat tertanggal 5 Februari 2013, yang terakhir adalah perombakan dan perubahan pejabat baru di SKPA terjadi tertanggal 22 Juni 2016 menjelang buka puasa, dimana para pejabat yang diganti berjumlah sebanyak 154 orang. Itu baru tingkat pejabat SKPA, belum lagi terjadi mutasi bagi SKPD di daerah, guru dan kepala sekolah tanpa memperhatikan prestasi maupun kemampuan dari pegawai itu sendiri.

Fenomena seperti ini menjadi harap-harap cemas para pegawai yang berharap untuk menduduki posisi tertentu dan cemas untuk kehilangan kursi jabatan. Pejabat yang tidak digeser pada mutasi awal belum bisa bernapas lega sebab biasanya mutasi jilid berikutnya akan membawa kabar buruk buat mereka. Tidak pandang bahwa sang pejabat memiliki kapasitas dan kredibilitas diposisi yang ditempatinya saat ini.

Idealnya PegawaiNegeri sipil tidak diseret-seret atau sengaja menyeret diri dalam ranah politik praktis dalam rangka pemilihan kepala daerah. Selain itu PNSD juga tetap menjaga netralitas dan tidak terprovokasi untuk terjun

langsung dalam politik praktis. agar pelayanan publik selalu stabil, bekerja lebih tenang dan tetap professional. Mutasi harusnya disandingkan dengan kata amputasi untuk menyebut perombakan kabinet di daerah. Sebab dalam praktiknya mutasi para pejabat dilingkup pemerintahan daerah tak jauh berbeda dengan definisi kata amputasi. Seolah memotong bagian tubuh yang terkena kanker ganas agar tidak menyebar keseluruh tubuh.

Tak ada studi kepatutan, kecakapan, kepantasan, kapasitas dan profesionalitas. Pertimbangan yang menjadi kriteria utama adalah kedekatan, kekerabatan, loyalitas dan balas budi. Ironis memang mimpi akan daerah yang maju disegala dimensi yang menjadi lagu-lagu kampanye para pemimpin sebelum berkuasa makin sumbangterdengar. Perombakan Kabinet ala daerah, Mutasi ala Amputasi menjadi ajang menancapkan kuku kekuasaan “raja-raja” kecil di daerah menuju pengamanan kebijakan dan merintis jalan menuju periode kedua masa jabatan.

Selain faktor politik, mutasi juga gagal mencapai tujuan penyegaran dan promosi aparatur karena dilakukan tanpa kajian yang matang. Seperti terjadi di Kota Pekanbaru. Mutasi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT

## *Mutasi: Antara Prestasi dan Ambisi*

terhadap ratusan pejabat memunculkan masalah sarana dan prasarana kerja. Sejumlah kepala sekolah yang dimutasi menjadi pengawas sekolah ternyata tak punya kursi dan meja khusus untuk bekerja. Padahal, jabatan ini strategis untuk kemajuan pendidikan di Pekanbaru, apalagi sejumlah kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas merupakan kepala sekolah berprestasi di Pekanbaru.

Sudah saatnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekretaris Daerah benar-benar difungsikan dan bekerja sesuai fungsinya. Baperjakat harus mampu meletakkan kepentingan profesionalisme di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan politis. Kepala daerah harus pula menghargai kerja Baperjakat/Tim Penilai Kinerja ASN, sehingga pejabat-pejabat yang ditunjuk benar-benar melalui prosedur kepegawaian, bukan kepentingan balas budi apalagi balas dendam. Jangan sampai keputusan yang salah menyebabkan muncul preseden buruk, dan Baperjakat pun dipelesetkan menjadi "**badan pertimbangan jauh dekat**". Muncul stigma dalam masyarakat mutasi apakah karena prestasi atau hanya ambisi dari sang penguasa semata.

**Lhokseumawe, 23 Maret 2016**



## GURU DALAM SEBUAH DILEMA

Kita sering membaca berita di media, baik media lokal maupun Nasional terkait beberapa dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah. Ada media yang menggabarkan bahwa seorang siswa ditampar atau pun ditendang oleh guru, bahkan uniknya ada yang dipukul pakai palu.

Membaca berita semacam ini tentu akan melahirkan perasaan miris. Bahkan tidak sedikit kalangan yang “panik”, khususnya dari kalangan orang tua siswa, yang dengan menggebu-gebu melempar kritikan pedas kepada guru. Dalam kondisi ini, guru yang diduga melakukan kekerasan tersebut berada pada posisi “terhukum”, “tercaci” dan “terpojok”. Aksi bully semacam itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua siswa dan masyarakat luas, tetapi terkadang juga melibatkan Dinas Pendidikan tempat para guru bernaung, di mana mereka juga ikut “mengecam.” Hampir tidak ada seorang pun yang menaruh simpati kepada guru ketika mereka berada dalam posisi sulit seperti ini.

Demikian pula, ketika guru akibat dugaan kekerasan harus berhadapan dengan hukum, juga sepi dari advokasi, padahal organisasi “pembela guru” hampir tak terhitung jumlahnya. Tapi semuanya diam membisu. Jika pun ada yang bersuara hanya satu dalam berjuta dan bisa dihitung dengan jari. Buktinya ramai guru yang akhirnya dibui. Tidak percaya, silahkan googling!

Mungkin sebagian kita akan berargumentasi bahwa guru semacam itu patut dihukum karena telah melakukan kekerasan. Atau mungkin pula sebagian kita akan bergumam bahwa guru itu adalah penjahat, sehingga haram hukumnya untuk dibela. Kadang-kadang, sebagai upaya melepas diri, Dinas Pendidikan dan organisasi guru akan berkata: “Kami sudah ingatkan semua guru untuk tidak melakukan kekerasan”, satu kalimat yang sangat-sangat “normatif.” Begitulah.

Pada prinsipnya saya, dan mungkin kita semua sepakat untuk menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak didik. Kekerasan dalam bentuk apa pun harus dihentikan. Kita tentu tidak ingin melahirkan anak didik yang brutal, bengis dan beringas. Pola pendidikan

“otoriter” dan suasana belajar yang tidak “demokratis” tentunya akan melahirkan generasi yang tidak toleran. Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan akan merusak peradaban. Tersebab itulah agama juga melarang kekerasan.

Saat ini, dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak maka larangan mempraktikkan kekerasan dalam dunia pendidikan sudah semakin tegas. Sebagai bangsa beradab, tentunya kita mendukung penuh penerapan Undang-Undang ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan kekerasan itu?

Di satu sisi, kelahiran UU Perlindungan Anak beberapa taun lalu merupakan sebuah kemajuan dalam dunia pendidikan, di mana setiap kita dituntut untuk menjaga hak-hak anak. Lebih tegasnya UU tersebut menyelip pesan agar kita semua mampu “memanusiakan” anak. Namun di sisi lain, UU Perlindungan Anak justru menempatkan guru dalam posisi dilematis. Guru dihadapkan pada posisi sulit, serba salah dan salah tingkah.

Mungkin apa yang saya sampaikan ini bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi. Lihat saja ketika media

menyajikan kisah-kisah “kekerasan” yang diduga dilakukan oleh oknum guru, kecaman pun mengalir deras hanya bermodalkan “sepotong” kisah di surat kabar. Sangat jarang pihak yang bersikap arif untuk melihat persoalan secara komprehensif, sebagian kita cenderung melakukan punishment dengan pengamatan parsial. Setiap membaca berita seorang guru melakukan “kekerasan,” mata kita hanya tertuju pada hasil (kekerasan) dengan guru sebagai “tersangka” utama, tetapi kita cenderung mengabaikan proses (kenapa itu terjadi).

Sebenarnya kita semua harus memahami bahwa guru bukanlah psikolog walaupun mereka sudah dibekali ilmu psikologi pendidikan. Artinya, guru juga manusia yang bisa saja terpancing amarahnya ketika menghadapi siswa yang mengidap bandel ekstrem. Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa tersebut umumnya bersifat insidentil (spontanitas), bukan kekerasan yang direncanakan.

Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun guru yang ketika berangkat dari rumah bertujuan untuk memukul siswa. Sebaliknya, tujuan mereka adalah untuk mendidik siswa menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak. Jika pun

ada siswa yang dipukul, dicubit dan sebagainya, maka itu bukanlah kekerasan (selama dalam batas kewajaran), tapi salah satu bentuk punishment agar siswa tidak lagi mengulang kesalahannya.

Pukulan mendidik dalam batas-batas yang wajar bukanlah kekerasan, dan bahkan agama pun mengizinkannya. Namun demikian, pukulan bukanlah satu-satunya bentuk hukuman dan lebih baik dihindari, tetapi dalam kondisi tertentu pukulan dalam batas yang wajar ini tetap dibutuhkan.

Berdasarkan riset kecil-kecilan yang saya lakukan, saya berkesimpulan bahwa UU Perlindungan Anak, jika ditafsirkan secara keliru justru akan menjadikan guru bersikap abai terhadap perilaku anak. Sebuah kasus yang mungkin relevan untuk diangkat adalah aksi tawuran antarsiswa, di mana banyak guru yang berusaha mencari titik aman. Pernah suatu ketika terjadi perkelahian antar siswa, ketika guru mencoba untuk melerai --yang dalam prosesnya guru juga terpaksa bersikap keras (seperti mencubit atau menjewer telinga, kadang-kadang menampar), oleh sebagian pihak, khususnya orang tua--

justru menyalahkan guru karena dianggap ikut melakukan kekerasan. Padahal semua orang paham bahwa dalam kasus-kasus semacam ini, sangat tidak mungkin bagi guru untuk melerai perkelahian dengan hanya berteriak-teriak pakai alat penguat suara.

Di beberapa sekolah terdapat siswa yang memang mengidap bandel ekstrem, di mana segala pendekatan tidak akan mempan untuk membuat siswa tersebut berubah. Di sebuah sekolah, ketika seorang guru honorer sedang mengajar, ada beberapa siswa yang mengangkat kaki ke atas meja, kaki tersebut tertuju ke arah guru (ada dokumentasinya). Berbagai pendekatan telah digunakan untuk mengingatkan siswa tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya, karena kesal dipukullah kaki siswa tersebut pakai penggaris. Mendapat pukulan, siswa langsung berontak dan melapor kepada orang tua. Keesokan harinya orang tua siswa tersebut justru mengamuk di sekolah.

Akhirnya karena takut terjerat hukum, guru akan membiarkan siswa melakukan apa saja tanpa upaya pencegahan. Demikian pula dengan perilaku sebagian siswa

yang kurang adab akan dibiarkan saja. Ketika terjadi tawuran guru juga akan “santai” saja, karena pencegahan akan diartikan sebagai kekerasan, dan kekerasan akan berujung pada penjara. Dan jika kondisi ini benar-benar terjadi, guru pula yang akan “dicaci” karena dianggap tidak becus mendidik siswa menjadi manusia yang berakhlak. Inilah yang saya sebut dilematis.

**Lhoksukon, 17 Januari 2016**

## Profil Penulis



**Qusthalani, M.Pd** dengan nama pena `qus_fs04`. Lahir di Aceh Timur pada tanggal 09 Maret 1986. Tinggal di Desa Beuringin LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan No HP yang dapat dihubungi adalah 0852 6023 4528, WA dan Telegram dengan nomor yang sama. Media sosial lainnya adalah `qusthalani` (facebook) dan `qus_fs04` (twitter), jika ada keperluan bisa juga email ke `qus_fs04@yahoo.co.id`. Qusthalani kecil sekolah di SD Inpres Arakeumudi dan SMPN 1 Lhoksukon diselesaikan di Aceh Utara, sedangkan SMK 1 Banda Aceh merupakan sekolah lanjutan yang ditempuh. Menyelesaikan program sarjana pada tahun 2009 pada Jurusan Pendidikan Fisika di Unsyiah, juga menyelesaikan program magister tahun 2015 pada jurusan IPA Kosentrasi Fisika di Unsyiah. Saat ini bertugas di SMAN 1 Matangkuli. Karya tulis perdana “UN tak lagi sakral” mengantarkannya lulus seleksi 10 besar



penulisan esai pendidikan tingkat Provinsi Aceh. Tahun 2016 kisah inspiratif masuk dalam lima besar dengan judul *"Lentera di Ujung Sumatera"*, dan ada beberapa opini yang sudah masuk kedalam surat kabar lokal di Aceh. Sekarang aktif di Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara sebagai ketua, Koordinator KIR Kabupaten Aceh Utara dan Wakil Ketua Gerakan Literasi Kabupaten Aceh Utara.



# Ingin Menerbitkan Buku?

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?

Sahabat bisa memilih beberapa paket penerbitan berikut ini:

## Hanya dengan Rp. 350.000 Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
  - Pembuatan Layout isi bergambar
  - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
  - Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
  - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
  - **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.

Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

**SEGERA** hubungi ke No. Hp. 082113883062 atau  
email ke [www.pena\\_indhis@yahoo.co.id](mailto:www.pena_indhis@yahoo.co.id) untuk info lebih lanjut.